

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan penyusunan Pelaksanaan Penilaian Resiko Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan.

Pelaksanaan Penilaian Resiko merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi. Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Lamongan, April 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. SHODIKIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661019 198703 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	4
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	4
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	5
BAB III PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	8
A. Penetapan Konteks/Tujuan	8
B. Hasil Identifikasi Risiko.....	12
C. Hasil Analisis Risiko	29
D. Pengendalian yang sudah dilakukan	45
E. Pengendalian yang masih dibutuhkan	51
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	62
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN	71
BAB VI PENUTUP	82
LAMPIRAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko, maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Dinas pendidikan Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2026 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE);
8. Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/193/KEP/413.013/2023 tahun 2023 tentang Struktur Pengelolaan Resiko Kabupaten Lamongan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pengelolaan Resiko dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

2. Tujuan

Pengelolaan Resiko bertujuan untuk (1) memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, (2) mewujudkan budaya pengendalian intern, (3) mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP, (4) memberikan rencana pemecahan masalah

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP ini meliputi pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan risiko kegiatan (operasional) OPD.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE) kepada 37 (tiga puluh tujuh) responden menunjukkan hasil lingkungan pengendalian menunjukkan hasil yang memadai meskipun masih ada catatan yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

Hasil penilaian lingkungan pengendalian tersebut selanjutnya divalidasi dan disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 1.
Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian
pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan Tahun 2026

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif Memadai	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan peran APIP yang Efektif Memadai	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation, menunjukkan kondisi yang memadai tapi masih diperlukan perbaikan agar dapat mencapai suatu kondisi yang di harapkan sebagai tujuan adanya pengelolaan resiko ini . Selanjutnya akan dilakukan pengendalian dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
Pada Dinas pendidikan Tahun 2026

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang diperbaiki	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
I	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA			
	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik ditindaklanjuti tapi masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku	Penegakan Integritas dan nilai etika sudah terbangun dengan baik dimana pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2026

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang diperbaiki	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
		yang berlaku dan ini perlu di tingkatkan		
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			
	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi tetapi belum dilakukan secara berkala.	Komitmen Terhadap Kompetensi di Dinas Pendidikan Kab. Lamongan sudah diterapkan dengan baik, tapi masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala dengan membuat perencanaan dan target yang harus dicapai dalam setiap pelatihan	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2026
3	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN			
	Tidak Semua pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap tetapi masih ada pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan sudah terbangun dengan baik tetapi masih ada Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2026

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang diperbaiki	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
		sehingga OPD perlu melakukan analisis dan pengajuan formasi ASN .		
4	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT			
	Masih ada kriteria pendelegasian wewenang ditentukan belum secara tepat	Pimpinan mengkomunikasikan wewenang dan tanggung jawab dengan jelas dan dipahami oleh pegawai, kemudian direviu dan dimutakhirkan secara berkala	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2026
5	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, tetapi belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Untuk Sub Unsur Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pimpinan OPD melakukan evaluasi kinerja pegawai, dan harus dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan sehingga antara kinerja sebanding dengan penghasilan	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2026

BAB III

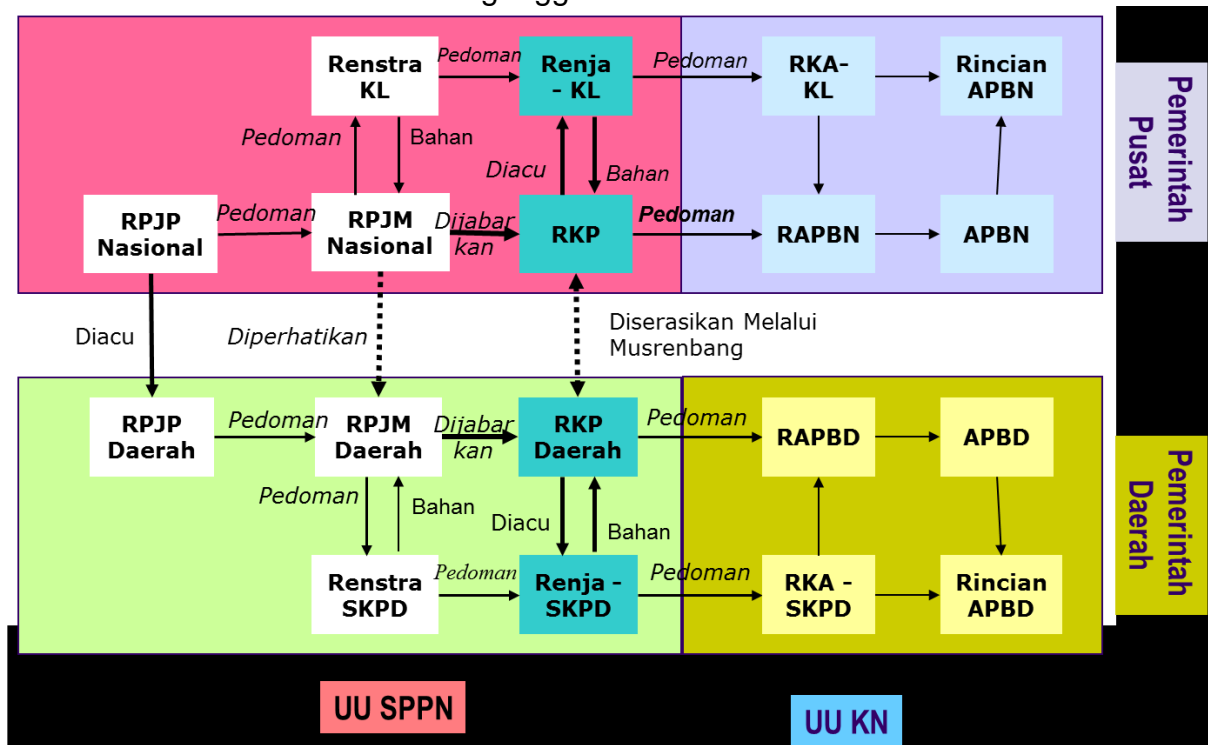
PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD, sebagai contoh, memuat antara lain tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dan OPD dalam satu masa pemerintahan kepala daerah. Sedangkan tujuan pada tingkatan kegiatan, antara lain tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja OPD (Renja). Oleh karena itu, tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja OPD.

Dalam kerangka perencanaan tersebut harus ada keselarasan antar dokumen sehingga masing-masing tingkatan akan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Secara rinci keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut tertuang dalam gambar berikut

Gambar 1.
Alur Perencanaan dan Penganggaran Serta Keterkaitan Antar Dokumen



Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, khususnya terkait dengan sub agenda Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Secara singkat substansi Renstra Dinas Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Visi

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan :

Visi :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”.

Makna dari atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Terwujudnya**, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. **Kejayaan**, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. **Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Semangat kejayaan yang berkeadilan dapat direpresentasikan dengan kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan. Secara teknis dapat diintervensi melalui sinergitas antar *stakeholder* pembangunan yakni

masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan sektor swasta serta akademisi sebagai suporting dalam pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan.

b. Misi

Sedangkan Untuk *Misi* Dinas Pendidikan juga mengacu pada misi ke 2 Pemerintah Daerah yaitu :

“ Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman “

a. Tujuan

Untuk merealisasikan visi dan misi ke 2 Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan bertujuan untuk memberikan arah dalam mewujudkan pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan mendukung tujuan yaitu:

” Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing””.

b. Sasaran

sasaran dinas pendidikan juga mengacu pada sasaran pemerintah daerah yaitu :

” Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan”

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Misi 2				RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman				
Tujuan 1				
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan				
Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan				
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Lamongan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggungjawab	
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitat pelayanan pendidikan	1. Terjaminnya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	1. Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	Kepala Dinas Pendidikan	
		2. Angka harapan lama sekolah (EYS)	Kepala Dinas Pendidikan	
	2. Meningkatnya kuallitas pendidik dan tenaga kependidikan	% Guru Bersertifikat Pendidik	Kepala Dinas Pendidikan	
	3. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Penilaian dari inspektorat	

B. Hasil Identifikasi Risiko

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappelitbangda, atau OPD yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis.

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertian gdalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renjadan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3, Eselon 4 dan Sub Koordinator.

Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.
Hasil Identifikasi Risiko Strategis

No	Indikator Kinerja	Resiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	Sebagian warga usia 15 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan formal tidak mengikuti program pendidikan kesetaraan	RSO.26.01.25.01	Kepala Dinas Pendidikan	1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga	Eksternal	C	1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan	Intansi, Pemda, dan Masyarakat
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	Sebagian peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan	RSO.26.01.25.02	Kepala Dinas Pendidikan	1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. Kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan	Internal	C	1. Angka Harapan Lama Sekolah menurun sehingga tidak mencapai target yang telah di tetapkan 2. Banyak pekerja anak di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan	Intansi, Pemda, dan Masyarakat
3	Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan	Sebagian guru belum dapat memenuhi persyaratan untuk	RSO.26.01.25.03	Kepala Dinas Pendidikan	1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar	Internal	C	1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan	Intansi, Pemda, Guru, dan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Resiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		sertifikat pendidik	memperoleh sertifikat pendidik			pada Dapodik			tidak merata dan mengalami penurunan	
4	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tidak mencapai target	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tidak mencapai target	RSO.26.01.25.04	Kepala Dinas Pendidikan	1. SDM yang tidak berkompeten 2. Integritas dan etika yang rendah	Internal	C	1. Tidak bisa tercapai pelayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas kinerja tidak bisa tercapai dengan baik	Intansi, Pemda, dan Masyarakat

Tabel 4.
Hasil Identifikasi Risiko Operasional

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 yang berpartisipasi dalam pendidikan SD/MI	Perencanaan	Risiko Operasional: Kesalahan input data Dapodik	Operator sekolah menginput jumlah siswa atau data siswa yang tidak sesuai kondisi sebenarnya	ROO.26.01.25.01	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	1. Operator kurang terlatih atau baru 2. Operator kurang teliti akibat beban kerja tinggi	Internal	C	1. Data tidak akurat 2. Perencanaan tidak tepat 3. Potensi salah hitung dana BOS	Sekolah, Guru dan Siswa, Dinas Pendidikan
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 yang berpartisipasi dalam pendidikan SD/MI	Perencanaan	Risiko Fraud: Manipulasi data jumlah siswa di aplikasi Dapodik agar dana BOS yang diterima lebih besar	Oknum di sekolah dengan sengaja menambah jumlah siswa dalam sistem agar dana BOS bertambah	ROO.26.01.25.02	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	1. Keinginan mendapatkan dana BOS lebih besar 2. Sanksi yang tidak tegas atau tidak diterapkan	Internal	C	1. Kerugian keuangan negara (dana BOS tidak tepat sasaran) 2. Ketidakadilan alokasi anggaran 3. Sekolah yang jujur justru kekurangan dana	Sekolah, Guru dan Siswa, Dinas Pendidikan
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 yang berpartisipasi dalam pendidikan	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Pengembang aplikasi Dapodik kurang responsif dalam memberikan	Pengembang sistem lambat merespons laporan kesalahan dari daerah sehingga data	ROO.26.01.25.03	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Ketertinggalan pada sistem pusat tanpa alternatif dukungan teknis lokal	Eksternal	C	1. Masalah error pada aplikasi Dapodik tidak teratasi dengan cepat 2. Keterlambatan input data secara	Sekolah, Guru dan Siswa, Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		SD/MI		bantuan teknis	tidak bisa diperbaiki tepat waktu						nasional/regional 3. Operator sekolah putus asa dan kinerja sekolah terganggu	
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah warga negara usia 13-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP/MTs	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Server PPDB online sering mengalami gangguan	Calon siswa mengakses sistem secara bersamaan, server tidak mampu menampung trafik sehingga sistem tidak bisa diakses	ROO.26.01.25 .04	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Server tidak kuat menampung jumlah pendaftar yang sangat banyak di waktu bersamaan	Internal	C	1. Pendaftaran tertunda 2. Data tidak tersimpan 3. Akses lambat saat puncak pendaftaran 4. Keluhan masyarakat	Calon siswa dan orang tua, Sekolah
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah warga negara usia 13-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP/MTs	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Manipulasi data kependudukan (seperti mengubah alamat KK) oleh orang tua calon siswa untuk menghindari aturan zonasi atau mendapatkan kuota afirmasi	Orang tua calon siswa mengubah alamat pada dokumen kependudukan agar masuk zona sekolah favorit	ROO.26.01.25 .05	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	1. Keinginan mendapatkan sekolah tertentu 2. Kurangnya verifikasi lapangan 3. Belum ada sanksi yang jelas bagi pemalsu data	Internal	C	1. Tujuan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi tidak tercapai 2. Siswa yang benar-benar berhak (sesuai zonasi/afirmasi) tergeser 3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem	Calon siswa dan orang tua, Sekolah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumbe		Uraian	Pihak yang Terkena
											PPDB	
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah warga negara usia 13-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP/MTs	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Ketergantungan pada penyedia sistem dan jaringan	Penyedia layanan internet mengalami gangguan saat masa puncak sehingga sistem PPDB tidak dapat diakses	ROO.26.01.25.06	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Kapasitas teknis terbatas	Eksternal	C	<ol style="list-style-type: none"> Jaringan yang lambat memperparah risiko server down Proses input data dan pendaftaran di sekolah-sekolah menjadi lambat Dinas sulit mengganti mitra saat PPDB sedang berlangsung, sehingga dapat menyebabkan kerugian 	Sekolah, Dinas Pendidikan
7	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga negara usia 5-6 yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Pemasangan APE (Alat Permainan Edukatif) tidak sesuai prosedur.	Petugas pemasangan atau pihak sekolah memasang APE tanpa mengikuti panduan teknis sehingga alat tidak stabil	ROO.26.01.25.07	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	<ol style="list-style-type: none"> Kurang pemahaman teknis Tidak ada pengawasan pemasangan 	Internal	C	APE yang dipasang mudah roboh atau patah, menimbulkan potensi cedera serius pada anak-anak PAUD saat bermain	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan
8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia	Jumlah warga negara usia	Perencanaan	Risiko Fraud: Harga APE dinaikkan atau	Oknum dalam proses pengadaan	ROO.26.01.25.08	Bidang PAUD/ Nonform	<ol style="list-style-type: none"> Lemahnya pengawasan Tidak ada 	Internal	C	Kerugian uang negara (anggaran terbuang), dan Dinas	Siswa, Sekolah, Dinas

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Dini (PAUD)	5-6 yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		spesifikasi diturunkan	bekerja sama dengan penyedia untuk menaikkan harga barang		al dan Bidang GTK	pembanding harga			mendapatkan APE dengan kualitas rendah karena dana yang seharusnya untuk kualitas dipakai untuk mark-up	Pendidikan
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga negara usia 5-6 yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Penyedia mengirim APE yang tidak sesuai standar keselamatan	Penyedia menyerahkan APE dengan bahan atau konstruksi yang tidak kuat dan berpotensi membahayakan anak	ROO.26.01.25.09	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	1. Tidak melakukan uji coba keamanan produk sebelum dikirim 2. Penyedia mengganti bahan yang sudah disepakati di kontrak dengan bahan yang lebih murah	Eksternal	C	APE yang diterima tidak aman (misalnya cat beracun atau sudut tajam), cepat rusak, dan harus sering diganti, yang berarti pemborosan anggaran	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 yang berpartisipasi dalam PNF	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Dana beasiswa terlambat dicairkan	Petugas verifikasi membutuhkan waktu lama memeriksa dokumen sehingga pencairan dana tertunda	ROO.26.01.25.10	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	1. Proses verifikasi dokumen penerima beasiswa memakan waktu lama 2. Dokumen tidak lengkap	Internal	C	1. Peserta didik nonformal kesulitan membayar biaya pendidikan tepat waktu 2. Kualitas proses belajar terganggu dan peserta didik bisa putus	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumbe		Uraian	Pihak yang Terkena
											sekolah	
11	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 yang berpartisipasi dalam PNF	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Dokumen atau data ekonomi dipalsukan demi mendapatkan beasiswa	Calon penerima mengubah data penghasilan orang tua agar terlihat tidak mampu	ROO.26.01.25.11	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	1. Ada kesempatan untuk memalsukan data karena proses verifikasi lapangan tidak menyeluruh 2. Kurangnya sanksi tegas bagi pelaku kecurangan	Internal	C	1. Beasiswa salah sasaran dan dinikmati oleh orang yang mampu 2. Peserta didik yang benar-benar membutuhkan beasiswa jadi tidak mendapatkan haknya 3. Kepercayaan publik menurun	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 yang berpartisipasi dalam PNF	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Lembaga nonformal tidak menyampaikan laporan penggunaan dana secara lengkap	Pengelola lembaga tidak melaporkan rincian penggunaan dana beasiswa secara lengkap	ROO.26.01.25.12	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Kurangnya pemahaman lembaga terkait pelaporan penggunaan dana	Eksternal	C	1. Sulit memastikan penggunaan dana 2. Ada potensi dana beasiswa disalahgunakan oleh pihak lembaga (misalnya untuk keperluan operasional lembaga, bukan untuk peserta didik)	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan
13	Penetapan kurikulum	Jumlah kurikulum	Pelaksanaan	Risiko Operasional:	Guru PAUD menerima	ROO.26.01.25.13	Bidang PAUD/	Kurikulum muatan lokal	Internal	C	Materi muak tidak tersampaikan	Siswa, Sekolah,

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumbe		Uraian	Pihak yang Terkena
	muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal yang berlaku		Guru PAUD kesulitan menerjemahkan kurikulum Mulok ke dalam bentuk permainan	modul Mulok tetapi tidak memahami cara mengubahnya menjadi kegiatan bermain yang sesuai usia anak		Nonformal, dan Bidang GTK	(mulok) yang dibuat terlalu bersifat teori dan tidak dilengkapi contoh praktis bagaimana cara mengajarkannya melalui kegiatan bermain			dengan baik kepada anak, sehingga tujuan pembelajaran (misalnya melestarikan budaya lokal) tidak tercapai	Dinas Pendidikan
14	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal yang berlaku	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Penyedia bahan ajar memalsukan laporan uji coba atau penilaian guru	Penyedia modul melaporkan bahwa guru sudah menguji dan menyetujui materi, padahal uji coba belum dilakukan secara nyata	ROO.26.01.25.14	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Ingin mempercepat pembayaran atau pengesahan modul	Internal	C	Kurikulum yang ditetapkan tidak cocok dengan kebutuhan anak	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan
15	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal yang berlaku	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Mitra menyerahkan modul yang tidak sesuai budaya lokal Lamongan dan tidak memberi pelatihan memadai	Mitra menyerahkan modul umum yang tidak menggambarkan budaya Lamongan dan hanya memberi pelatihan singkat tanpa praktik	ROO.26.01.25.15	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Mitra penyusun kurikulum tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek, hanya mengejar deadline, dan pelatihan yang diberikan sekadar formalitas	Internal	C	Dana yang dikeluarkan Dinas untuk menyusun kurikulum dan pelatihan terbuang sia-sia. Guru tetap bingung, dan isi kurikulum tidak dapat diterapkan	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumbe		Uraian	Pihak yang Terkena
16	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang naik jabatan tepat waktu	Perencanaan	Risiko Operasional: Pengajuan formasi ASN tidak sesuai analisis kebutuhan	Tim perencanaan mengajukan jumlah formasi guru tanpa memperbarui data rasio guru dan rombel terbaru	ROO.26.01.25.16	Bidang GTK	Data tidak diperbarui, koordinasi lemah, tekanan waktu	Internal	C	1. Terjadi kelebihan guru di satu wilayah 2. Terjadi kekurangan guru di wilayah lain 3. Pemerataan tidak tercapai	Sekolah, Dinas Pendidikan
17	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang naik jabatan tepat waktu	Perencanaan	Risiko Fraud: Terjadi praktik suap atau kecurangan dalam penempatan guru berstatus ASN	Oknum menawarkan imbalan kepada pejabat agar ditempatkan di sekolah tertentu	ROO.26.01.25.17	Bidang GTK	Ada oknum pejabat atau panitia yang menawarkan penempatan di sekolah favorit dengan imbalan uang (suap) atau bantuan khusus	Internal	C	Penempatan guru tidak berdasarkan kebutuhan sekolah, tapi berdasarkan uang. Hal ini merusak keadilan dan motivasi guru yang jujur	Sekolah, Dinas Pendidikan
18	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang naik jabatan tepat	Perencanaan	Risiko Kemitraan: Lembaga mitra yang ditunjuk untuk melakukan	Konsultan menyusun laporan kebutuhan guru tanpa survei lapangan yang	ROO.26.01.25.18	Bidang GTK	Lembaga mitra yang dikontrak untuk melakukan analisis kebutuhan ASN	Eksternal	C	Formasi salah dan distribusi tidak merata	Sekolah, Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumbe		Uraian	Pihak yang Terkena
	n bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	waktu		analisis kebutuhan GTK (penelitian/konsultan) memberikan data yang tidak akurat kepada Dinas	memadai			(pegawai) tidak bekerja serius atau hanya menyalin data lama demi menyelesaikan kontrak				
19	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Perencanaan	Risiko Operasional: Dokumen perencanaan terlambat diselesaikan	Subbag Perencanaan belum menyelesaikan dokumen perencanaan tepat waktu karena data dari bidang terlambat masuk	ROO.26.01.25.19	Sekretariat	1. Staf yang menyusun dokumen memiliki beban kerja ganda 2. Melibatkan banyak bidang dan data 3. Panduan penyusunan dokumen berubah-ubah	Internal	C	Anggaran dan kegiatan program Dinas menjadi terlambat dilaksanakan di awal tahun, sehingga target kinerja tahunan sulit tercapai	Dinas Pendidikan
20	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Pelaporan	Risiko Fraud: Manipulasi data capaian kinerja dalam laporan agar terlihat bagus	Pejabat melakukan atau diminta menaikkan angka capaian dalam laporan agar indikator terlihat tercapai	ROO.26.01.25.20	Sekretariat	Tekanan agar target terlihat tercapai	Internal	C	Laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya	Dinas Pendidikan
21	Perencanaan, penganggaran	Persentase dokumen perencanaan	Perencanaan	Risiko Kemitraan: Ketidaksinkrona	Dinas Pendidikan mengusulkan	ROO.26.01.25.21	Sekretariat	Kurangnya koordinasi dan komunikasi	Eksternal	C	1. Revisi berulang 2. Keterlambatan dokumen	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumbe		Uraian	Pihak yang Terkena
	n, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		n prioritas antara Dinas Pendidikan dengan Bappeda	program yang ternyata tidak menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah sehingga harus direvisi			formal di tingkat teknis saat penyusunan rencana program, sehingga Dinas dan Bappeda memiliki fokus berbeda.			3. Potensi pengurangan anggaran	
22	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Terjadi kesalahan dalam penginputan data gaji atau tunjangan	Petugas keuangan salah menginput data gaji atau tunjangan sehingga nilai yang dibayarkan tidak sesuai	ROO.26.01.25.22	Sekretariat	Pegawai yang menginput data kurang teliti atau terburu-buru, atau sistem input data yang digunakan masih manual dan rentan salah ketik	Internal	C	Pegawai menerima gaji/tunjangan yang jumlahnya salah (kelebihan atau kekurangan), yang bisa menimbulkan protes, ketidakpuasan, atau kerugian keuangan Dinas/negara	Dinas Pendidikan
23	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Pegawai tetap menerima tunjangan anak meskipun tidak lagi memenuhi syarat (anak sudah lulus kuliah/menikah/berusia >21/25 tahun)	Pegawai tidak melaporkan bahwa anaknya sudah menikah atau melebihi batas usia sehingga tunjangan tetap dibayarkan	ROO.26.01.25.23	Sekretariat	Pegawai tidak melaporkan perubahan status anak (lulus sekolah, menikah, atau usia melebihi batas) agar tunjangan tetap dibayarkan	Internal	C	Kelebihan bayar dan potensi temuan audit	Dinas Pendidikan
24	Administrasi keuangan	Persentase pengelolaan	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan:	Sistem perbankan	ROO.26.01.25.24	Sekretariat	Sistem di Bank yang menjadi	Eksternal	C	Proses transfer dana atau pencairan gaji	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumbe		Uraian	Pihak yang Terkena
	perangkat daerah	keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku		Sistem bank mengalami gangguan saat proses transfer gaji	error pada hari pencairan sehingga sebagian pegawai belum menerima gaji			mitra pembayaran gaji mengalami gangguan teknis atau adanya perbaikan sistem Bank yang tidak diumumkan sebelumnya			mengalami keterlambatan	
25	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang tersedia dengan baik	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai jadwal atau standar teknis	Pengelola kendaraan menunda servis berkala sehingga kendaraan mengalami kerusakan berat	ROO.26.01.25 .25	Sekretariat	1. Kurangnya pengawasa 2. Tidak ada jadwal servis tertulis 3. Keterbatasan anggaran	Internal	C	1. Kendaraan rusak 2. Biaya perbaikan meningkat 3. Kegiatan dinas terganggu	Dinas Pendidikan
26	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang tersedia dengan baik	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi atau disewakan	Pegawai menggunakan kendaraan dinas untuk liburan keluarga tanpa izin	ROO.26.01.25 .26	Sekretariat	1. Kurangnya sanksi yang tegas 2. Tidak ada buku catatan perjalanan/ logbook 3. Pengawasan atasan yang lemah	Internal	C	1. Pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinas 2. Peningkatan keausan kendaraan 3. Rusaknya citra pegawai/dinas di mata publik	Dinas Pendidikan
27	Administrasi umum	Persentase administrasi	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan:	Bengkel rekanan	ROO.26.01.25 .27	Sekretariat	Kurangnya pemeriksaan	Internal	C	1. Kendaraan cepat rusak	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumbe		Uraian	Pihak yang Terkena
	perangkat daerah	umum yang tersedia dengan baik		Bengkel mengganti suku cadang asli dengan yang tidak asli	memasang suku cadang kualitas rendah tetapi menagih harga suku cadang asli			suku cadang saat pemasangan, atau ada kolusi (kerja sama curang) antara oknum pegawai dan bengkel.			2. Pemborosan anggaran	
28	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak pakai	Perencanaan	Risiko Operasional: Spesifikasi barang tidak sesuai kebutuhan	Pejabat perencana menyusun spesifikasi tanpa konsultasi dengan pengguna sehingga barang tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.01.25 .28	Sekretariat	Petugas yang membuat spesifikasi kurang mengerti kebutuhan teknis, atau spesifikasi dibuat terlalu umum (tidak detail).	Internal	C	Barang yang dibeli tidak bisa dipakai atau fungsinya tidak maksimal, sehingga harus dibeli ulang dan menyebabkan kerugian anggaran	Dinas Pendidikan
29	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak pakai	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Petugas penerima menerima barang bekas/rekondisi yang diakui sebagai barang baru	Petugas penerima tidak memeriksa fisik barang secara detail atau sengaja menerima barang bekas	ROO.26.01.25 .29	Sekretariat	1. Adanya kesepakatan curang antara petugas penerima barang dan penyedia 2. Kurang telitinya panitia saat memeriksa barang yang	Internal	C	1. Kualitas barang cepat menurun 2. Barang cepat rusak 3. Mengurangi masa pakai yang seharusnya bisa lebih lama	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
									datang			
30	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak pakai	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Penyedia tidak mengirim barang lengkap atau mengirim barang palsu/bekas	Penyedia mengirim barang kualitas rendah atau tidak lengkap untuk menekan biaya	ROO.26.01.25 .30	Sekretariat	1. Lemahnya pengawasan terhadap proses pengiriman barang oleh penyedia 2. Kontrak tidak mencantumkan sanksi yang berat jika barang palsu/bekas dikirim	Internal	C	1. Pekerjaan dinas terhambat karena barang tidak lengkap 2. Harus menunggu pengiriman ulang 3. Kualitas rendah	Dinas Pendidikan
31	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan baik	Pelaksanaan	Risiko Operasional: WiFi kantor lambat saat jam kerja sehingga menghambat input data dan layanan administrasi	Pegawai tidak dapat menginput data atau mengirim laporan karena koneksi sangat lambat	ROO.26.01.25 .31	Sekretariat	1. Penggunaan jaringan berlebihan (misalnya banyak pegawai mengakses video atau download besar) 2. Kapasitas internet yang dibeli terlalu kecil	Internal	C	1. Pekerjaan dinas (pengiriman data, meeting online, pelayanan publik) menjadi sangat lambat dan terhambat 2. Mengurangi kecepatan kerja	Dinas Pendidikan
32	Penyediaan jasa penunjang urusan	Persentase jasa penunjang urusan	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Pegawai menggunakan WiFi kantor	Oknum pegawai mengunduh film atau	ROO.26.01.25 .32	Sekretariat	Pegawai merasa tidak ada pengawasan,	Internal	C	1. Menghabiskan kuota internet kantor yang dibayar negara	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumbe		Uraian	Pihak yang Terkena
	pemerintahan daerah	pemerintahan daerah yang tersedia dengan baik		untuk kepentingan pribadi (streaming, unduhan besar, bisnis pribadi)	menjalankan bisnis pribadi menggunakan WiFi kantor saat jam kerja			atau tidak ada aturan yang melarang penggunaan internet untuk kepentingan pribadi.			2. Jaringan menjadi lemot bagi pegawai yang benar-benar bekerja	
33	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan baik	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Penyedia internet lambat merespons gangguan atau kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan	Penyedia internet tidak segera memperbaiki gangguan meskipun sudah dilaporkan	ROO.26.01.25.33	Sekretariat	Standar pelayanan (SLA) dalam kontrak dengan penyedia internet tidak ketat atau tidak mencantumkan batas waktu perbaikan yang jelas	Eksternal	C	Jika internet rusak, layanan publik dan pekerjaan Dinas bisa terhenti karena perbaikan yang berlarut-larut	Dinas Pendidikan
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang layak pakai	Perencanaan	Risiko Operasional: Dana pemeliharaan habis di pertengahan tahun karena banyak kerusakan tak terduga	Banyak sekolah melaporkan kerusakan berat di luar perkiraan sehingga dana pemeliharaan terserap lebih cepat	ROO.26.01.25.34	Sekretariat	1. Hasil perbaikan sebelumnya kurang baik 2. Kerusakan yang tidak terprediksi (misalnya banjir atau kebocoran atap saat musim hujan)	Internal	C	1. Gedung kantor atau sekolah yang rusak parah tidak bisa diperbaiki hingga tahun anggaran berikutnya 2. Mengganggu kegiatan belajar/kerja 3. Membahayakan pengguna	Dinas Pendidikan
35	Pemeliharaan Barang	Persentase Barang Milik	Perencanaan	Risiko Fraud: Anggaran	Staf keuangan menyetujui	ROO.26.01.25.35	Sekretariat	1. Panitia penerima	Internal	C	Kerugian keuangan daerah dan	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C / U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumbe		Uraian	Pihak yang Terkena
	Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Daerah yang layak pakai		pengecatan gedung dicairkan, tapi yang dicat hanya bagian depan saja	klaim pengecatan tanpa melakukan audit atau inspeksi menyeluruh			hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh (hanya mengecek bagian yang terlihat) 2. Adanya kerja sama curang antara panitia dan kontraktor			bangunan cepat rusak	
36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang layak pakai	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Penyedia jasa bekerja asal-asalan sehingga hasil perbaikan cepat rusak	Tukang atau penyedia jasa bekerja asal-asalan sehingga cat mengelupas atau perbaikan retak kembali dalam waktu singkat	ROO.26.01.25 .36	Sekretariat	Kontraktor hanya mencari untung besar dengan menggunakan bahan murah dan tenaga kerja yang tidak terampil (tidak profesional).	Eksternal	C	Hasil rehabilitasi gedung jelek, cepat rusak, dan umur pakainya pendek, sehingga Dinas harus menganggarkan biaya perbaikan lagi dalam waktu singkat.	Dinas Pendidikan

C. Hasil Analisis Risiko

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi:

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal.
2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Kemudian dilakukan penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (tolerable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Rumusan kriteria tersebut, ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Setelah itu, dilakukan penilaian risiko terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko, kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko dan skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk).

Dalam penyusunan RTP ini tim menggunakan skala dampak dalam skala 5, contoh kategori dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 4.
Kategori Dampak Risiko Skala 5

Katagori Dampak	Skor	Operasional Dampak resiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputase	Hukum
Sangat tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif,tersebar luas dibanyak media masa	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegaitan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/local	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisiensi	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisiensi	Negatis, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negative, namun tidak material	Tidak Material

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Untuk skala probabilitas, tim penyusun menggunakan kriteria penilaian skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut :

Tabel5.
Tabel Tingkat Kemungkinan/Probabilitas

Level Kemungkinan	Skor	Kriteria Kemungkinan		
		Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi	1	$0% < x \leq 5%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi	2	$5% < x \leq 10%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi	3	$10% < x \leq 20%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir

Sering terjadi	4	20% < x ≤ 50%	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi	5	50% < x < 100%	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Dalam menentukan skala risiko penulis menggunakan nilai skala 5 dengan ilustrasi sebagai berikut :

Tabel 6.
Kriteria Penerima Risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1,00 – 2,00	Sangat Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
2,01-4,00	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 – 9,00	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya
9,01 – 12,00	Tinggi	Harus menjadi Perhatian manajemen	diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
12,01 – 25,00	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

Penentuan risiko prioritas dan acceptable/unacceptable risk, digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite yang telah ditentukan. Matriks risiko dapat dibuat skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut :

Diagram 1.
Penilaian Risiko Prioritas

Matriks Analisis Risiko			Dampak Konsekuensi				
			1	2	3	4	5
			Tdk. Signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti					
	4	Kemungkinan Besar					
	3	Mungkin					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					
Keterangan			Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat tinggi (5)

Tabel
Daftar Resiko Prioritas

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan							
1	Dinas Pendidikan	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.26.01.25.01	11	Kepala Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan
2	Dinas Pendidikan	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.26.01.25.02	9	Kepala Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. Kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Harapan Lama Sekolah menurun sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan 2. Banyak pekerja anak di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan
3	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik	RSO.26.01.25.03	12	Kepala Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
							penurunan
4	Dinas Pendidikan	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tidak mencapai target	RSO.26.01.25.04	10	Kepala Dinas Pendidikan	1. SDM yang tidak berkompoten 2. Integritas dan etika yang rendah	1. Tidak bisa tercapai pelayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas kinerja tidak bisa tercapai dengan baik
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan							
1	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Kesalahan input data Dapodik	ROO.26.01.25.01	9	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	1. Operator kurang terlatih atau baru 2. Operator kurang teliti akibat beban kerja tinggi	1. Data tidak akurat 2. Perencanaan tidak tepat 3. Potensi salah hitung dana BOS
2	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Manipulasi data jumlah siswa di aplikasi Dapodik agar dana BOS yang diterima lebih besar	ROO.26.01.25.02	9	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	1. Keinginan mendapatkan dana BOS lebih besar 2. Sanksi yang tidak tegas atau tidak diterapkan	1. Kerugian keuangan negara (dana BOS tidak tepat sasaran) 2. Ketidakadilan alokasi anggaran 3. Sekolah yang jujur justru kekurangan dana
3	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Pengembang aplikasi Dapodik kurang responsif dalam memberikan bantuan teknis	ROO.26.01.25.03	10	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Ketergantungan pada sistem pusat tanpa alternatif dukungan teknis lokal	1. Masalah error pada aplikasi Dapodik tidak teratasi dengan cepat 2. Keterlambatan input data secara nasional/regional

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
							3. Operator sekolah putus asa dan kinerja sekolah terganggu
4	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Server PPDB online sering mengalami gangguan	ROO.26.01.25.04	9	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Server tidak kuat menampung jumlah pendaftar yang sangat banyak di waktu bersamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran tertunda 2. Data tidak tersimpan 3. Akses lambat saat puncak pendaftaran 4. Keluhan masyarakat
5	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Manipulasi data kependudukan (seperti mengubah alamat KK) oleh orang tua calon siswa untuk menghindari aturan zonasi atau mendapatkan kuota afirmasi	ROO.26.01.25.05	10	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan mendapatkan sekolah tertentu 2. Kurangnya verifikasi lapangan 3. Belum ada sanksi yang jelas bagi pemalsu data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi tidak tercapai 2. Siswa yang benar-benar berhak (sesuai zonasi/afirmasi) tergeser 3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem PPDB
6	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Ketergantungan pada penyedia sistem dan jaringan	ROO.26.01.25.06	10	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Kapasitas teknis terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan yang lambat memperparah risiko server down 2. Proses input data dan pendaftaran di sekolah-sekolah menjadi lambat 3. Dinas sulit mengganti

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
							mitra saat PPDB sedang berlangsung, sehingga dapat menyebabkan kerugian
7	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Pemasangan APE (Alat Permainan Edukatif) tidak sesuai prosedur.	ROO.26.01.25.07	11	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang pemahaman teknis 2. Tidak ada pengawasan pemasangan 	APE yang dipasang mudah roboh atau patah, menimbulkan potensi cedera serius pada anak-anak PAUD saat bermain
8	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Harga APE dinaikkan atau spesifikasi diturunkan	ROO.26.01.25.08	8	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan 2. Tidak ada pembandingan harga 	Kerugian uang negara (anggaran terbuang), dan Dinas mendapatkan APE dengan kualitas rendah karena dana yang seharusnya untuk kualitas dipakai untuk mark-up
9	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Penyedia mengirim APE yang tidak sesuai standar keselamatan	ROO.26.01.25.09	10	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan uji coba keamanan produk sebelum dikirim 2. Penyedia mengganti bahan yang sudah disepakati di kontrak dengan bahan yang lebih murah 	APE yang diterima tidak aman (misalnya cat beracun atau sudut tajam), cepat rusak, dan harus sering diganti, yang berarti pemborosan anggaran

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
10	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Dana beasiswa terlambat dicairkan	ROO.26.01.25.10	9	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses verifikasi dokumen penerima beasiswa memakan waktu lama 2. Dokumen tidak lengkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik nonformal kesulitan membayar biaya pendidikan tepat waktu 2. Kualitas proses belajar terganggu dan peserta didik bisa putus sekolah
11	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Dokumen atau data ekonomi dipalsukan demi mendapatkan beasiswa	ROO.26.01.25.11	10	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kesempatan untuk memalsukan data karena proses verifikasi lapangan tidak menyeluruh 2. Kurangnya sanksi tegas bagi pelaku kecurangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa salah sasaran dan dinikmati oleh orang yang mampu 2. Peserta didik yang benar-benar membutuhkan beasiswa jadi tidak mendapatkan haknya 3. Kepercayaan publik menurun
12	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Lembaga nonformal tidak menyampaikan laporan penggunaan dana secara lengkap	ROO.26.01.25.12	10	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Kurangnya pemahaman lembaga terkait pelaporan penggunaan dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit memastikan penggunaan dana 2. Ada potensi dana beasiswa disalahgunakan oleh pihak lembaga (misalnya untuk keperluan operasional lembaga, bukan untuk peserta

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
							didik)
13	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Guru PAUD kesulitan menerjemahkan kurikulum Mulok ke dalam bentuk permainan	ROO.26.01.25.13	10	Bidang PAUD/ Nonformal, dan Bidang GTK	Kurikulum muatan lokal (mulok) yang dibuat terlalu bersifat teori dan tidak dilengkapi contoh praktis bagaimana cara mengajarkannya melalui kegiatan bermain	Materi mulok tidak tersampaikan dengan baik kepada anak, sehingga tujuan pembelajaran (misalnya melestarikan budaya lokal) tidak tercapai
14	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Penyedia bahan ajar memalsukan laporan uji coba atau penilaian guru	ROO.26.01.25.14	10	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Ingin mempercepat pembayaran atau pengesahan modul	Kurikulum yang ditetapkan tidak cocok dengan kebutuhan anak
15	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Mitra menyerahkan modul yang tidak sesuai budaya lokal Lamongan dan tidak memberi pelatihan memadai	ROO.26.01.25.15	9	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Mitra penyusun kurikulum tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek, hanya mengejar deadline, dan pelatihan yang diberikan sekadar formalitas	Dana yang dikeluarkan Dinas untuk menyusun kurikulum dan pelatihan terbuang sia-sia. Guru tetap bingung, dan isi kurikulum tidak dapat diterapkan
16	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Pengajuan formasi ASN tidak sesuai analisis kebutuhan	ROO.26.01.25.16	9	Bidang GTK	Data tidak diperbarui, koordinasi lemah, tekanan waktu	1. Terjadi kelebihan guru di satu wilayah 2. Terjadi kekurangan guru di wilayah lain 3. Pemerataan tidak

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
							tercapai
17	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Terjadi praktik suap atau kecurangan dalam penempatan guru berstatus ASN	ROO.26.01.25.17	9	Bidang GTK	Ada oknum pejabat atau panitia yang menawarkan penempatan di sekolah favorit dengan imbalan uang (suap) atau bantuan khusus	Penempatan guru tidak berdasarkan kebutuhan sekolah, tapi berdasarkan uang. Hal ini merusak keadilan dan motivasi guru yang jujur
18	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Lembaga mitra yang ditunjuk untuk melakukan analisis kebutuhan GTK (penelitian/konsultan) memberikan data yang tidak akurat kepada Dinas	ROO.26.01.25.18	9	Bidang GTK	Lembaga mitra yang dikontrak untuk melakukan analisis kebutuhan ASN (pegawai) tidak bekerja serius atau hanya menyalin data lama demi menyelesaikan kontrak	Formasi salah dan distribusi tidak merata
19	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Dokumen perencanaan terlambat diselesaikan	ROO.26.01.25.19	9	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf yang menyusun dokumen memiliki beban kerja ganda 2. Melibatkan banyak bidang dan data 3. Panduan penyusunan dokumen berubah-ubah 	Anggaran dan kegiatan program Dinas menjadi terlambat dilaksanakan di awal tahun, sehingga target kinerja tahunan sulit tercapai

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
20	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Manipulasi data capaian kinerja dalam laporan agar terlihat bagus	ROO.26.01.25.20	9	Sekretariat	Tekanan agar target terlihat tercapai	Laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya
21	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan : Ketidaksinkronan prioritas antara Dinas Pendidikan dengan Bappeda	ROO.26.01.25.21	10	Sekretariat	Kurangnya koordinasi dan komunikasi formal di tingkat teknis saat penyusunan rencana program, sehingga Dinas dan Bappeda memiliki fokus berbeda	1. Revisi berulang 2. Keterlambatan dokumen 3. Potensi pengurangan anggaran
22	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Terjadi kesalahan dalam penginputan data gaji atau tunjangan	ROO.26.01.25.22	9	Sekretariat	Pegawai yang menginput data kurang teliti atau terburu-buru, atau sistem input data yang digunakan masih manual dan rentan salah ketik	Pegawai menerima gaji/tunjangan yang jumlahnya salah (kelebihan atau kekurangan), yang bisa menimbulkan protes, ketidakpuasan, atau kerugian keuangan Dinas/negara
23	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Pegawai tetap menerima tunjangan anak meskipun tidak lagi memenuhi syarat (anak sudah lulus kuliah/menikah/berusia >21/25 tahun)	ROO.26.01.25.23	10	Sekretariat	Pegawai tidak melaporkan perubahan status anak (lulus sekolah, menikah, atau usia melebihi batas) agar tunjangan tetap dibayarkan	Kelebihan bayar dan potensi temuan audit
24	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Sistem bank mengalami gangguan saat proses transfer gaji	ROO.26.01.25.24	9	Sekretariat	Sistem di Bank yang menjadi mitra pembayaran gaji	Proses transfer dana atau pencairan gaji mengalami keterlambatan

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
						mengalami gangguan teknis atau adanya perbaikan sistem Bank yang tidak diumumkan sebelumnya	
25	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai jadwal atau standar teknis	ROO.26.01.25.25	9	Sekretariat	1. Kurangnya pengawasan 2. Tidak ada jadwal servis tertulis 3. Keterbatasan anggaran	1. Kendaraan rusak 2. Biaya perbaikan meningkat 3. Kegiatan dinas terganggu
26	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi atau disewakan	ROO.26.01.25.26	10	Sekretariat	1. Kurangnya sanksi yang tegas 2. Tidak ada buku catatan perjalanan/ logbook 3. Pengawasan atasan yang lemah	1. Pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinas 2. Peningkatan keausan kendaraan 3. Rusaknya citra pegawai/dinas di mata publik
27	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Bengkel mengganti suku cadang asli dengan yang tidak asli	ROO.26.01.25.27	10	Sekretariat	Kurangnya pemeriksaan suku cadang saat pemasangan, atau ada kolusi (kerja sama curang) antara oknum pegawai dan bengkel	1. Kendaraan cepat rusak 2. Pemborosan anggaran
28	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Spesifikasi barang tidak	ROO.26.01.25.28	9	Sekretariat	Petugas yang membuat spesifikasi	Barang yang dibeli tidak bisa dipakai atau

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		sesuai kebutuhan				kurang mengerti kebutuhan teknis, atau spesifikasi dibuat terlalu umum (tidak detail).	fungsinya tidak maksimal, sehingga harus dibeli ulang dan menyebabkan kerugian anggaran
29	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Petugas penerima menerima barang bekas/rekondisi yang diakui sebagai barang baru	ROO.26.01.25.29	9	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kesepakatan curang antara petugas penerima barang dan penyedia Kurang telitinya panitia saat memeriksa barang yang datang 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas barang cepat menurun Barang cepat rusak Mengurangi masa pakai yang seharusnya bisa lebih lama
30	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Penyedia tidak mengirim barang lengkap atau mengirim barang palsu/bekas	ROO.26.01.25.30	9	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> Lemahnya pengawasan terhadap proses pengiriman barang oleh penyedia Kontrak tidak mencantumkan sanksi yang berat jika barang palsu/bekas dikirim 	<ol style="list-style-type: none"> Pekerjaan dinas terhambat karena barang tidak lengkap Harus menunggu pengiriman ulang Kualitas rendah
31	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: WiFi kantor lambat saat jam kerja sehingga	ROO.26.01.25.31	11	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> Penggunaan jaringan berlebihan 	<ol style="list-style-type: none"> Pekerjaan dinas (pengiriman data, meeting online,

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		menghambat input data dan layanan administrasi				(misalnya banyak pegawai mengakses video atau download besar) 2. Kapasitas internet yang dibeli terlalu kecil	pelayanan publik) menjadi sangat lambat dan terhambat 2. Mengurangi kecepatan kerja
32	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Pegawai menggunakan WiFi kantor untuk kepentingan pribadi (streaming, unduhan besar, bisnis pribadi)	ROO.26.01.25.32	9	Sekretariat	Pegawai merasa tidak ada pengawasan, atau tidak ada aturan yang melarang penggunaan internet untuk kepentingan pribadi	1. Menghabiskan kuota internet kantor yang dibayar negara 2. Jaringan menjadi lemot bagi pegawai yang benar-benar bekerja
33	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Penyedia internet lambat merespons gangguan atau kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.01.25.33	10	Sekretariat	Standar pelayanan (SLA) dalam kontrak dengan penyedia internet tidak ketat atau tidak mencantumkan batas waktu perbaikan yang jelas	Jika internet rusak, layanan publik dan pekerjaan Dinas bisa terhenti karena perbaikan yang berlarut-larut
34	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Dana pemeliharaan habis di pertengahan tahun karena banyak kerusakan tak terduga	ROO.26.01.25.34	9	Sekretariat	1. Hasil perbaikan sebelumnya kurang baik 2. Kerusakan yang tidak terprediksi (misalnya banjir atau kebocoran atap saat musim	1. Gedung kantor atau sekolah yang rusak parah tidak bisa diperbaiki hingga tahun anggaran berikutnya 2. Mengganggu kegiatan belajar/kerja

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
						hujan)	3. Membahayakan pengguna
35	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Anggaran pengecatan gedung dcairkan, tapi yang dicat hanya bagian depan saja	ROO.26.01.25.35	9	Sekretariat	1. Panitia penerima hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh (hanya mengecek bagian yang terlihat) 2. Adanya kerja sama curang antara panitia dan kontraktor	Kerugian keuangan daerah dan bangunan cepat rusak
36	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Penyedia jasa bekerja asal-asalan sehingga hasil perbaikan cepat rusak	ROO.26.01.25.36	8	Sekretariat	Kontraktor hanya mencari untung besar dengan menggunakan bahan murah dan tenaga kerja yang tidak terampil (tidak profesional).	Hasil rehabilitasi gedung jelek, cepat rusak, dan umur pakainya pendek, sehingga Dinas harus menganggarkan biaya perbaikan lagi dalam waktu singkat

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko:

Tabel 7.
Pengendalian yang sudah dilakukan

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
Resiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:				
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.26.01.25.01	Pendataan masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal	Banyaknya penduduk Lamongan yang berdomisili di luar Kabupaten Lamongan
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.26.01.25.2	Memberikan Beasiswa PERINTIS untuk peserta didik dari keluarga miskin dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi	Keterbatasan Anggaran sehingga masih ada peserta didik yang memenuhi syarat tapi belum mendapatkan beasiswa
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik	RSO.26.01.25.3	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 Melakukan sosialisasi pada guru akan pentingnya sertifikat pendidik 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya minat guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1/D4 Masih banyak guru yang belum masuk di aplikasi Dapodik
4	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tidak mencapai target	RSO.26.01.25.4	<ol style="list-style-type: none"> Perbup No. 29 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Program Pelatihan dan BIMTEK SAKIP 	Masih terdapat kualitas SDM yang belum memenuhi standar

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
1	Risiko Operasional: Kesalahan input data Dapodik	ROO.26.01.25.01	Pelatihan operator sekolah dan chat WhatsApp untuk tanya jawab teknis	Pelatihan belum rutin dan belum diikuti oleh semua operator baru
2	Risiko Fraud: Manipulasi data jumlah siswa di aplikasi Dapodik agar dana BOS yang diterima lebih besar	ROO.26.01.25.02	1. Audit internal 2. Laporan penggunaan dana BOS 3. Monitoring oleh tim BOS kabupaten	1. Audit belum berbasis analisis risiko 2. Tidak semua sekolah diperiksa secara mendalam 3. Sistem sulit mendeteksi jika siswa tersebut ada di data tapi fisiknya tidak pernah sekolah.
3	Risiko Kemitraan: Pengembang aplikasi Dapodik kurang responsif dalam memberikan bantuan teknis	ROO.26.01.25.03	1. Pelaporan kendala melalui kanal resmi 2. Koordinasi melalui forum admin Dapodik	1. Tidak ada batas waktu respon yang pasti 2. Daerah tidak bisa memperbaiki sistem secara mandiri
4	Risiko Operasional: Server PPDB online sering mengalami gangguan	ROO.26.01.25.04	1. Penjadwalan waktu pendaftaran 2. Monitoring server selama PPDB 3. Tim teknis siaga saat masa pendaftaran	1. Belum ada uji beban (stress test) sebelum PPDB 2. Kapasitas server belum disesuaikan dengan jumlah pendaftar 3. Tidak ada server cadangan
5	Risiko Fraud: Manipulasi data kependudukan (seperti mengubah alamat KK) oleh orang tua calon siswa untuk menghindari aturan zonasi atau mendapatkan kuota afirmasi	ROO.26.01.25.05	1. Persyaratan dokumen KK 2. Validasi tanggal penerbitan KK 3. Pengumuman hasil secara terbuka	1. Ketergantungan penuh pada dokumen administrasi 2. Tidak ada verifikasi faktual domisili 3. Tidak ada sistem deteksi pola alamat mencurigakan
6	Risiko Kemitraan: Ketergantungan pada penyedia sistem dan jaringan	ROO.26.01.25.06	1. Kontrak kerja sama dengan penyedia layanan 2. Koordinasi teknis sebelum pelaksanaan PPDB	Ketergantungan pada satu provider saja.
7	Risiko Operasional:	ROO.26.01.25.07	Meminta bukti berita	1. Tidak ada

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
	Pemasangan APE (Alat Permainan Edukatif) tidak sesuai prosedur.		acara serah terima dan foto pemasangan dari pihak sekolah setelah APE terpasang.	pengecekan teknis setelah pemasangan 2. Tidak ada checklist keselamatan sebelum digunakan
8	Risiko Fraud: Harga APE dinaikkan atau spesifikasi diturunkan	ROO.26.01.25.08	1. Proses pengadaan sesuai aturan 2. Dokumen kontrak dan spesifikasi teknis	1. Tidak ada survei harga pasar independen 2. Evaluasi kualitas barang kurang detail
9	Risiko Kemitraan: Penyedia mengirim APE yang tidak sesuai standar keselamatan	ROO.26.01.25.09	Dalam kontrak sudah dicantumkan spesifikasi teknis bahan, dan Dinas melakukan pemeriksaan fisik saat barang diterima.	Pemeriksaan fisik hanya melihat dari luar, tidak mampu mendeteksi kandungan kimia (misalnya cat beracun) atau kekuatan bahan secara mendalam.
10	Risiko Operasional: Dana beasiswa terlambat dicairkan	ROO.26.01.25.10	1. Penetapan jadwal batas akhir pengumpulan dokumen. 2. Membuat daftar periksa kelengkapan dokumen.	Verifikasi masih mengandalkan dokumen fisik yang rawan hilang atau lambat diproses.
11	Risiko Fraud: Dokumen atau data ekonomi dipalsukan demi mendapatkan beasiswa	ROO.26.01.25.11	1. Persyaratan dokumen resmi 2. Verifikasi administrasi oleh petugas	1. Tidak ada verifikasi lapangan 2. Tidak ada pengecekan silang dengan data sosial lainnya
12	Risiko Kemitraan: Lembaga nonformal tidak menyampaikan laporan penggunaan dana secara lengkap	ROO.26.01.25.12	1. Lembaga wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana. 2. Evaluasi tahunan lembaga	1. Laporan yang diserahkan lembaga tidak detail (hanya berupa total angka). 2. Dinas tidak melakukan audit mendadak atau pengecekan bukti pembayaran di lembaga.
13	Risiko Operasional: Guru PAUD kesulitan menerjemahkan	ROO.26.01.25.13	Dinas sudah mengadakan satu kali sosialisasi atau	Pelatihan yang diberikan terlalu singkat atau tidak

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
	kurikulum Mulok ke dalam bentuk permainan		workshop pengenalan kurikulum mulok.	fokus pada sesi praktik membuat rencana permainan harian yang langsung bisa diterapkan guru.
14	Risiko Fraud: Penyedia bahan ajar memalsukan laporan uji coba atau penilaian guru	ROO.26.01.25.14	Dinas mewajibkan adanya dokumen laporan hasil uji coba dan tanda tangan dari beberapa guru yang menjadi responden.	Dinas tidak melakukan verifikasi langsung kepada guru-guru responden. Laporan hanya dicek secara dokumen, sehingga mudah dipalsukan.
15	Risiko Kemitraan: Mitra menyerahkan modul yang tidak sesuai budaya lokal Lamongan dan tidak memberi pelatihan memadai	ROO.26.01.25.15	1. Review draft modul 2. Rapat pembahasan dengan tim internal	1. Tidak ada uji kelayakan budaya secara mendalam 2. Tidak ada standar minimal jam pelatihan
16	Risiko Operasional: Pengajuan formasi ASN tidak sesuai analisis kebutuhan	ROO.26.01.25.16	Menggunakan data jumlah siswa dan guru di setiap sekolah sebagai dasar pengajuan formasi.	Data yang dipakai hanya melihat jumlah total guru, tidak memperhatikan spesialisasi mata pelajaran guru (misalnya: butuh guru Matematika, tapi yang diajukan guru Seni).
17	Risiko Fraud: Terjadi praktik suap atau kecurangan dalam penempatan guru berstatus ASN	ROO.26.01.25.17	Membentuk tim penempatan dan menempatkan guru berdasarkan hasil seleksi dan pengumuman resmi.	Kurangnya pengawasan setelah pengumuman resmi. Prosedur penempatan akhir masih bisa dimanipulasi di tingkat pelaksana.
18	Risiko Kemitraan: Lembaga mitra yang ditunjuk untuk melakukan analisis kebutuhan GTK (penelitian/konsultan) memberikan data yang tidak akurat kepada Dinas	ROO.26.01.25.18	Dinas meminta laporan hasil kerja dari lembaga mitra sesuai perjanjian kontrak.	Dinas tidak melakukan validasi atau cross-check data ke lapangan (sekolah) untuk memastikan kebenaran data yang diberikan mitra.
19	Risiko Operasional: Dokumen perencanaan terlambat diselesaikan	ROO.26.01.25.19	1. Jadwal tahapan perencanaan 2. Rapat koordinasi internal 3. Monitoring melalui aplikasi perencanaan	Staf baru belum memahami cara penyusunan dokumen perencanaan

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
20	Risiko Fraud: Manipulasi data capaian kinerja dalam laporan agar terlihat bagus	ROO.26.01.25.20	1. Review laporan oleh atasan langsung 2. Evaluasi kinerja tahunan 3. Pemeriksaan oleh Inspektorat	Tidak ada pengecekan acak (random check) ke lapangan untuk membandingkan data laporan dengan bukti fisik atau data riil di sekolah/UPT.
21	Risiko Kemitraan : Ketidaksinkronan prioritas antara Dinas Pendidikan dengan Bappeda	ROO.26.01.25.21	Dinas Pendidikan mengirimkan usulan program dalam rapat teknis.	Belum ada notulen komitmen prioritas yang terdokumentasi jelas yang merumuskan detail program dan anggaran.
22	Risiko Operasional: Terjadi kesalahan dalam penginputan data gaji atau tunjangan	ROO.26.01.25.22	Ada dua orang yang bertugas memeriksa data (proses checking dan verifying) sebelum pembayaran gaji dilakukan.	Proses pemeriksaan (cek) dilakukan oleh pemeriksa yang juga terburu-buru, atau mereka hanya melihat angka tanpa mencocokkan kembali dengan data dasar kepegawaian.
23	Risiko Fraud: Pegawai tetap menerima tunjangan anak meskipun tidak lagi memenuhi syarat (anak sudah lulus kuliah/menikah/berusia >21/25 tahun)	ROO.26.01.25.23	Pegawai wajib mengisi surat pernyataan setiap tahun untuk memastikan data keluarga masih valid.	Surat pernyataan hanya formalitas, tidak ada pengecekan silang (cross-check) ke sekolah/Universitas atau instansi lain untuk memverifikasi kebenaran laporan pegawai.
24	Risiko Kemitraan: Sistem bank mengalami gangguan saat proses transfer gaji	ROO.26.01.25.24	1. Koordinasi rutin dengan pihak bank 2. Konfirmasi transfer setelah pencairan	Gangguan terjadi tiba-tiba dan tidak ada skema cadangan transfer
25	Risiko Operasional: Pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai jadwal atau standar teknis	ROO.26.01.25.25	Terdapat daftar aset dan jadwal servis rutin.	Jadwal hanya di atas kertas, tidak ada pengecekan fisik bahwa servis sudah dilakukan sesuai standar.
26	Risiko Fraud: Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi atau disewakan	ROO.26.01.25.26	Terdapat peraturan bahwa kendaraan dinas hanya untuk urusan kantor.	Aturan tidak ditegakkan, tidak ada pemeriksaan mendadak (sidak) di luar jam kerja.
27	Risiko Kemitraan: Bengkel	ROO.26.01.25.27	1. Kontrak kerja sama	Pemeriksaan saat

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
	mengganti suku cadang asli dengan yang tidak asli		dengan bengkel resmi yang terpercaya 2. Bukti pembayaran dan nota servis	perbaikan tidak detail; tidak ada saksi dari Dinas yang mengawasi proses penggantian suku cadang di bengkel.
28	Risiko Operasional: Spesifikasi barang tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.01.25.28	Adanya dokumen spesifikasi teknis dan pemeriksaan oleh atasan sebelum pengadaan.	Spesifikasi dibuat tanpa melibatkan pengguna barang yang sebenarnya, sehingga tidak sesuai kebutuhan lapangan.
29	Risiko Fraud: Petugas penerima menerima barang bekas/rekondisi yang diakui sebagai barang baru	ROO.26.01.25.29	Ada tim penerima barang yang bertugas memeriksa barang saat datang.	Pemeriksaan hanya melihat kemasan luar tanpa menguji fungsi barang secara mendalam, sehingga barang bekas yang dikemas ulang tetap lolos.
30	Risiko Kemitraan: Penyedia tidak mengirim barang lengkap atau mengirim barang palsu/bekas	ROO.26.01.25.30	Ada kontrak yang menyebutkan jenis, jumlah, dan merek barang yang harus dikirim.	Sanksi di kontrak lemah, dan penyedia tahu bahwa Dinas jarang melakukan pengecekan mendalam terhadap keaslian atau status barang (baru/bekas).
31	Risiko Operasional: WiFi kantor lambat saat jam kerja sehingga menghambat input data dan layanan administrasi	ROO.26.01.25.31	1. Pemasangan password Wi-Fi 2. Pembatasan jumlah perangkat yang tersambung.	Belum ada sistem yang membatasi penggunaan data untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan (seperti blokir situs tertentu).
32	Risiko Fraud: Pegawai menggunakan WiFi kantor untuk kepentingan pribadi (streaming, unduhan besar, bisnis pribadi)	ROO.26.01.25.32	Himbauan lisan dari atasan untuk menggunakan internet secara bijak.	Tidak ada sanksi tegas atau alat pelacak penggunaan internet setiap pegawai secara spesifik.
33	Risiko Kemitraan: Penyedia internet lambat merespons gangguan atau kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.01.25.33	Dinas punya kontak hotline atau Customer Service penyedia jasa internet.	Tidak ada denda atau teguran tertulis yang otomatis diberikan jika penyedia jasa lambat memperbaiki kerusakan.
34	Risiko Operasional: Dana	ROO.26.01.25.34	Anggaran tahunan	Tidak ada dana

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
	pemeliharaan habis di pertengahan tahun karena banyak kerusakan tak terduga		sudah disiapkan berdasarkan usulan dari sekolah/unit kerja.	cadangan atau dana tak terduga yang dialokasikan khusus untuk perbaikan mendesak.
35	Risiko Fraud: Anggaran pengecatan gedung dicairkan, tapi yang dicat hanya bagian depan saja	ROO.26.01.25.35	Kontrak tertulis yang menyebutkan seluruh bagian gedung harus dicat.	Tidak ada foto atau video hasil pekerjaan dari seluruh sisi gedung (depan, belakang, samping) sebagai bukti serah terima.
36	Risiko Kemitraan: Penyedia jasa bekerja asal-asalan sehingga hasil perbaikan cepat rusak	ROO.26.01.25.36	Kontrak mencantumkan spesifikasi material yang harus digunakan.	Pengawasan di lapangan (mandor atau pengawas Dinas) tidak rutin berada di lokasi proyek untuk memantau detail pekerjaan.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risikoterdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari risiko (avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (abate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention).

3. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (mitigate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).

4. Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenyaaantara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5. Menerima atau mempertahankan risiko (accept/retain)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. Dari pembahasan dalam tim maka ditetapkan pengendalian yang masih dibutuhkan tergambar sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 8.
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan					
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.26.01.25.01	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang PNF	Januari - Desember 2026
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.26.01.25.2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Januari - Desember 2026

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	Pendidikan	
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik	RSO.26.01.25.3	2. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 3. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang GTK	Januari - Desember 2026
4	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tidak mencapai target	RSO.26.01.25.4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan					
1	Risiko Operasional: Kesalahan input data Dapodik	ROO.26.01.25.01	Menyelenggarakan workshop rutin khusus untuk operator baru dan sosialisasi perubahan aturan input data	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
2	Risiko Fraud: Manipulasi data jumlah siswa di aplikasi Dapodik agar dana BOS yang diterima lebih besar	ROO.26.01.25.02	1. Rekonsiliasi data Dapodik dengan kondisi riil di sekolah 2. Audit berbasis risiko (prioritas sekolah dengan data tidak wajar) 3. Penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			(whistleblowing)		
3	Risiko Kemitraan: Pengembang aplikasi Dapodik kurang responsif dalam memberikan bantuan teknis	ROO.26.01.25.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi berkala dengan pengelola sistem pusat 2. Pengendalian manual sementara jika sistem bermasalah 	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
4	Risiko Operasional: Server PPDB online sering mengalami gangguan	ROO.26.01.25.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan uji beban sistem sebelum PPDB 2. Menambah kapasitas server saat masa puncak 3. Menyediakan server cadangan (backup system) 	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
5	Risiko Fraud: Manipulasi data kependudukan (seperti mengubah alamat KK) oleh orang tua calon siswa untuk menghindari aturan zonasi atau mendapatkan kuota afirmasi	ROO.26.01.25.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi silang dengan data kependudukan 2. Pemeriksaan sampel lapangan untuk kasus tertentu 3. Penetapan batas waktu minimal perubahan KK sebelum PPDB 	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
6	Risiko Kemitraan: Ketergantungan pada penyedia sistem dan jaringan	ROO.26.01.25.06	Menyediakan alternatif jaringan cadangan.	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
7	Risiko Operasional: Pemasangan APE (Alat Permainan Edukatif) tidak sesuai prosedur.	ROO.26.01.25.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat checklist pemasangan aman 2. Pemeriksaan fisik sebelum serah terima final 3. Pelatihan singkat kepada 	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			sekolah		
8	Risiko Fraud: Harga APE dinaikkan atau spesifikasi diturunkan	ROO.26.01.25.08	2. Survei harga pembanding sebelum pengadaan 3. Pemeriksaan spesifikasi barang secara detail	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
9	Risiko Kemitraan: Penyedia mengirim APE yang tidak sesuai standar keselamatan	ROO.26.01.25.09	Mensyaratkan sertifikat uji laboratorium dari pihak ketiga yang kredibel (misalnya SNI), dan menerapkan sanksi denda yang berat jika kualitas tidak sesuai.	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
10	Risiko Operasional: Dana beasiswa terlambat dicairkan	ROO.26.01.25.10	1. Menetapkan standar waktu verifikasi 2. Membuat sistem monitoring status berkas 3. Sosialisasi kelengkapan dokumen sebelum pengajuan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
11	Risiko Fraud: Dokumen atau data ekonomi dipalsukan demi mendapatkan beasiswa	ROO.26.01.25.11	1. Validasi silang dengan data kependudukan atau bantuan sosial 2. Pemeriksaan sampel lapangan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
12	Risiko Kemitraan: Lembaga nonformal tidak menyampaikan laporan penggunaan dana secara lengkap	ROO.26.01.25.12	1. Mewajibkan lembaga mitra mengisi laporan bulanan dengan rincian penggunaan dana yang sangat detail,	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			termasuk foto dan bukti pembayaran. 2. Menetapkan tim audit internal Dinas untuk melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pembukuan lembaga mitra.		
13	Risiko Operasional: Guru PAUD kesulitan menerjemahkan kurikulum Mulok ke dalam bentuk permainan	ROO.26.01.25.13	Mengadakan pelatihan lanjutan yang wajibkan guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) berbasis permainan sebelum pelatihan berakhir.	Bidang PAUD/ Nonformal, dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
14	Risiko Fraud: Penyedia bahan ajar memalsukan laporan uji coba atau penilaian guru	ROO.26.01.25.14	Melakukan wawancara acak (random check) atau kunjungan mendadak ke sekolah yang namanya tercantum dalam laporan uji coba untuk memverifikasi kebenaran laporan.	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026
15	Risiko Kemitraan: Mitra menyerahkan modul yang tidak sesuai budaya lokal Lamongan dan tidak memberi pelatihan memadai	ROO.26.01.25.15	1. Melibatkan budayawan/aka demisi lokal dalam review 2. Menetapkan standar minimal pelatihan praktik	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			3. Evaluasi modul sebelum disahkan		
16	Risiko Operasional: Pengajuan formasi ASN tidak sesuai analisis kebutuhan	ROO.26.01.25.16	Wajib menggunakan sistem analisis kebutuhan yang mengukur perbandingan antara beban jam mengajar total dengan jumlah guru per mata pelajaran.	Bidang GTK	Januari - Desember 2026
17	Risiko Fraud: Terjadi praktik suap atau kecurangan dalam penempatan guru berstatus ASN	ROO.26.01.25.17	Membuat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat dan guru yang ditempatkan, dan menggunakan sistem acak (random) yang jelas untuk penempatan akhir.	Bidang GTK	Januari - Desember 2026
18	Risiko Kemitraan: Lembaga mitra yang ditunjuk untuk melakukan analisis kebutuhan GTK (penelitian/konsultan) memberikan data yang tidak akurat kepada Dinas	ROO.26.01.25.18	Dinas wajib membentuk tim kecil untuk melakukan uji petik (sampling) minimal 10% dari data yang disajikan mitra untuk membandingkan dengan kondisi riil di lapangan.	Bidang GTK	Januari - Desember 2026
19	Risiko Operasional: Dokumen perencanaan terlambat diselesaikan	ROO.26.01.25.19	Mengadakan pelatihan teknis rutin tentang penyusunan dokumen perencanaan bagi semua staf terkait, serta membuat checklist	Sekretariat	Januari - Desember 2026

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			penyusunan dokumen yang wajib ditandatangani.		
20	Risiko Fraud: Manipulasi data capaian kinerja dalam laporan agar terlihat bagus	ROO.26.01.25.20	Membentuk tim audit internal yang bertugas melakukan verifikasi lapangan secara mendadak terhadap sampel data capaian kinerja yang dilaporkan.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
21	Risiko Kemitraan : Ketidaksinkronan prioritas antara Dinas Pendidikan dengan Bappeda	ROO.26.01.25.21	Mengadakan pertemuan teknis bulanan (formal dan terstruktur) antara staf perencana Dinas Pendidikan dan staf di Bappeda untuk menyamakan persepsi dan prioritas sebelum program final disahkan.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
22	Risiko Operasional: Terjadi kesalahan dalam penginputan data gaji atau tunjangan	ROO.26.01.25.22	Wajib menggunakan sistem komputerisasi untuk perhitungan gaji, dan setiap input harus diverifikasi oleh atasan menggunakan checklist khusus sebelum diajukan ke bendahara.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
23	Risiko Fraud: Pegawai tetap menerima tunjangan anak meskipun tidak lagi memenuhi syarat (anak sudah lulus	ROO.26.01.25.23	Wajib ada audit data tunjangan anak setiap 6 bulan. Bagian Kepegawaian harus meminta	Sekretariat	Januari - Desember 2026

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	kuliah/menikah/berusia >21/25 tahun)		bukti terbaru (misalnya surat keterangan belum menikah atau status kuliah) dari setiap anak yang usianya mendekati batas tanggungan.		
24	Risiko Kemitraan: Sistem bank mengalami gangguan saat proses transfer gaji	ROO.26.01.25.24	1. Penjadwalan transfer lebih awal sebelum tanggal gaji 2. Mekanisme pengaduan cepat jika terjadi gangguan	Sekretariat	Januari - Desember 2026
25	Risiko Operasional: Pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai jadwal atau standar teknis	ROO.26.01.25.25	Mewajibkan setiap kendaraan punya kartu kontrol servis yang diisi dan ditandatangani bengkel, lalu dicek oleh atasan.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
26	Risiko Fraud: Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi atau disewakan	ROO.26.01.25.26	Mewajibkan buku catatan perjalanan (logbook) yang mencantumkan tujuan, jarak tempuh, dan harus ditandatangani atasan setiap selesai tugas.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
27	Risiko Kemitraan: Bengkel mengganti suku cadang asli dengan yang tidak asli	ROO.26.01.25.27	Pegawai Dinas wajib ikut mengecek suku cadang yang akan dipasang, memastikan ada label keaslian, dan menyimpan sisa suku cadang yang diganti.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
28	Risiko Operasional: Spesifikasi barang	ROO.26.01.25.28	Setiap spesifikasi wajib ditinjau dan	Sekretariat	Januari - Desember

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	tidak sesuai kebutuhan		disetujui oleh petugas yang akan menggunakan barang tersebut (pengguna akhir).		2026
29	Risiko Fraud: Petugas penerima menerima barang bekas/rekondisi yang diakui sebagai barang baru	ROO.26.01.25.29	Wajib ada uji coba fungsi dan pengecekan fisik mendalam (misal: cek nomor seri) untuk memastikan barang benar-benar baru sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
30	Risiko Kemitraan: Penyedia tidak mengirim barang lengkap atau mengirim barang palsu/bekas	ROO.26.01.25.30	Memasukkan klausul (pasal) di kontrak yang menyatakan bahwa penyedia akan langsung diblacklist dan wajib mengganti rugi penuh jika terbukti mengirim barang palsu atau bekas.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
31	Risiko Operasional: WiFi kantor lambat saat jam kerja sehingga menghambat input data dan layanan administrasi	ROO.26.01.25.31	Memasang firewall atau aplikasi untuk memprioritaskan traffic pekerjaan dan membatasi akses ke situs yang tidak penting.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
32	Risiko Fraud: Pegawai menggunakan WiFi kantor untuk kepentingan pribadi (streaming, unduhan besar, bisnis pribadi)	ROO.26.01.25.32	Membuat dan menyebarkan surat edaran resmi tentang larangan penggunaan internet kantor untuk hal pribadi, disertai sanksi jika melanggar.	Sekretariat	Januari - Desember 2026

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
33	Risiko Kemitraan: Penyedia internet lambat merespons gangguan atau kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.01.25.33	Melakukan evaluasi kontrak dan menambahkan klausul denda keterlambatan respons atau ancaman pemutusan kontrak jika layanan tidak sesuai standar.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
34	Risiko Operasional: Dana pemeliharaan habis di pertengahan tahun karena banyak kerusakan tak terduga	ROO.26.01.25.34	Melakukan survei kondisi gedung secara berkala (misal setiap 6 bulan) untuk memetakan potensi kerusakan besar, dan menyiapkan dana tak terduga dalam jumlah yang memadai.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
35	Risiko Fraud: Anggaran pengecatan gedung dicairkan, tapi yang dicat hanya bagian depan saja	ROO.26.01.25.35	Mewajibkan panitia penerima hasil pekerjaan untuk membuat Laporan Serah Terima Berbasis Dokumentasi Foto & Video dari setiap sudut area yang dikerjakan.	Sekretariat	Januari - Desember 2026
36	Risiko Kemitraan: Penyedia jasa bekerja asal-asalan sehingga hasil perbaikan cepat rusak	ROO.26.01.25.36	Memperkuat pengawasan lapangan dengan menugaskan satu pengawas Dinas secara penuh di lokasi proyek, serta menetapkan denda yang berat jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar mutu.	Sekretariat	Januari - Desember 2026

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu tim menentukan Rancangan Informasi dan Komunikasi sebagai berikut:

Tabel 9.
Rancangan Informasi dan Komunikasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Resiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:							
1	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Surat Undangan Nota Dinas Rapat Koordinasi	Dinas Pendidikan	Instansi dan Pemerintahan Desa Terkait	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
2	1. Memprioritaskan siswa dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Mengajukan penambahan anggaran untuk beasiswa	Surat Undangan Media Sosial Surat Pengajuan Penambahan Anggaran	Dinas Pendidikan (Sekretariat)	Instansi Terkait, Satuan Pendidikan, Peserta didik dan Mahasiswa	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Surat Undangan Rapat Sosialisasi Luring/Daring	Dinas Pendidikan (Bidang GTK)	Satuan Pendidikan dan Guru	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada semua pegawai	Surat Undangan Rapat Koordinasi Luring/Daring	Dinas Pendidikan (Sekretariat)	Pegawai Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Resiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:							
1	Menyelenggarakan workshop rutin khusus untuk operator baru dan sosialisasi perubahan aturan input data	Rapat Sosialisasi dan Bimtek Surat Undangan Juknis	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Operator Dapodik	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
2	1. Rekonsiliasi data Dapodik dengan kondisi riil di sekolah 2. Audit berbasis risiko (prioritas sekolah dengan data tidak wajar) 3. Penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing)	Nota Dinas Website Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan Operator Dapodik	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
3	1. Koordinasi berkala dengan pengelola sistem pusat 2. Pengendalian manual sementara jika sistem bermasalah	Nota Dinas Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Operator Dapodik	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
4	1. Melakukan uji beban sistem sebelum PPDB 2. Menambah kapasitas server saat masa puncak 3. Menyediakan server cadangan (backup system)	Nota Dinas Juknis	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
5	1. Validasi silang dengan data kependudukan 2. Pemeriksaan sampel lapangan untuk kasus tertentu 3. Penetapan batas waktu minimal perubahan KK sebelum PPDB	Juknis Website Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
6	Menyediakan alternatif jaringan	Nota Dinas	Bidang	Operator	Januari -		dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	cadangan.	Juknis	Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Dapodik dan Satuan Pendidikan	Desember 2026		secara berkala atau pada waktu tertentu
7	1. Membuat checklist pemasangan aman 2. Pemeriksaan fisik sebelum serah terima final 3. Pelatihan singkat kepada sekolah	Juknis Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
8	1. Survei harga pembanding sebelum pengadaan 2. Pemeriksaan spesifikasi barang secara detail	Juknis Nota Dinas	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
9	Mensyaratkan sertifikat uji laboratorium dari pihak ketiga yang kredibel (misalnya SNI), dan menerapkan sanksi denda yang berat jika kualitas tidak sesuai.	Juknis Nota Dinas	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan dan pihak terkait	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
10	1. Menetapkan standar waktu verifikasi 2. Membuat sistem monitoring status berkas 3. Sosialisasi kelengkapan dokumen sebelum pengajuan	Juknis Website Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Guru, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
11	1. Validasi silang dengan data kependudukan atau bantuan sosial 2. Pemeriksaan sampel lapangan	Juknis Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
12	1. Mewajibkan lembaga mitra mengisi laporan bulanan dengan rincian penggunaan dana yang sangat detail, termasuk foto dan bukti pembayaran. 2. Menetapkan tim audit internal Dinas untuk melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pembukuan lembaga mitra.	Nota Dinas Juknis	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
13	Mengadakan pelatihan lanjutan yang wajibkan guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) berbasis permainan sebelum pelatihan berakhir.	Rapat Sosialisasi dan Bimtek Surat Undangan	Bidang PAUD/ Nonformal, dan Bidang GTK	Guru	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
14	Melakukan wawancara acak (random check) atau kunjungan mendadak ke sekolah yang namanya tercantum dalam laporan uji coba untuk memverifikasi kebenaran laporan.	Nota Dinas	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
15	1. Melibatkan budayawan/akademisi lokal dalam review 2. Menetapkan standar minimal pelatihan praktik 3. Evaluasi modul sebelum disahkan	Rapat Sosialisasi dan Bimtek Juknis	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
16	Wajib menggunakan sistem analisis kebutuhan yang mengukur perbandingan antara beban jam mengajar total dengan jumlah guru per mata pelajaran.	Juknis Website	Bidang GTK	Guru dan Satuan pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
17	Membuat Pakta Integritas yang	Nota Dinas	Bidang GTK	Guru dan			dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	ditandatangani oleh pejabat dan guru yang ditempatkan, dan menggunakan sistem acak (random) yang jelas untuk penempatan akhir.	Rapat Sosialisasi dan Bimtek		Satuan pendidikan			secara berkala atau pada waktu tertentu
18	Dinas wajib membentuk tim kecil untuk melakukan uji petik (sampling) minimal 10% dari data yang disajikan mitra untuk membandingkan dengan kondisi riil di lapangan.	Nota Dinas	Bidang GTK	Pihak terkait			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
19	Mengadakan pelatihan teknis rutin tentang penyusunan dokumen perencanaan bagi semua staf terkait, serta membuat checklist penyusunan dokumen yang wajib ditandatangani.	Rapat Sosialisasi dan Bimtek Juknis	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
20	Membentuk tim audit internal yang bertugas melakukan verifikasi lapangan secara mendadak terhadap sampel data capaian kinerja yang dilaporkan.	Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
21	Mengadakan pertemuan teknis bulanan (formal dan terstruktur) antara staf perencana Dinas Pendidikan dan staf di Bappeda untuk menyamakan persepsi dan prioritas sebelum program final disahkan.	Rapat Sosialisasi dan Bimtek Juknis	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
22	Wajib menggunakan sistem komputerisasi untuk perhitungan gaji, dan setiap input harus	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	diverifikasi oleh atasan menggunakan checklist khusus sebelum diajukan ke bendahara.						pada waktu tertentu
23	Wajib ada audit data tunjangan anak setiap 6 bulan. Bagian Kepegawaian harus meminta bukti terbaru (misalnya surat keterangan belum menikah atau status kuliah) dari setiap anak yang usianya mendekati batas tanggungan.	Nota Dinas Juknis	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
24	1. Penjadwalan transfer lebih awal sebelum tanggal gaji 2. Mekanisme pengaduan cepat jika terjadi gangguan	Nota Dinas Website Media Sosial	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
25	Mewajibkan setiap kendaraan punya kartu kontrol servis yang diisi dan ditandatangani bengkel, lalu dicek oleh atasan.	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
26	Mewajibkan buku catatan perjalanan (logbook) yang mencantumkan tujuan, jarak tempuh, dan harus ditandatangani atasan setiap selesai tugas.	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
27	Pegawai Dinas wajib ikut mengecek suku cadang yang akan dipasang, memastikan ada label keaslian, dan menyimpan sisa suku cadang yang diganti.	Juknis Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
28	Setiap spesifikasi wajib ditinjau dan disetujui oleh petugas yang akan menggunakan barang tersebut (pengguna akhir).	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
29	Wajib ada uji coba fungsi dan pengecekan fisik mendalam (misal: cek nomor seri) untuk memastikan barang benar-benar baru sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
30	Memasukkan klausul (pasal) di kontrak yang menyatakan bahwa penyedia akan langsung dblacklist dan wajib mengganti rugi penuh jika terbukti mengirim barang palsu atau bekas.	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
31	Memasang firewall atau aplikasi untuk memprioritaskan traffic pekerjaan dan membatasi akses ke situs yang tidak penting.	Nota Dinas Juknis	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
32	Membuat dan menyebarkan surat edaran resmi tentang larangan penggunaan internet kantor untuk hal pribadi, disertai sanksi jika melanggar.	Surat Undangan Nota Dinas Media Sosial	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
33	Melakukan evaluasi kontrak dan menambahkan klausul denda keterlambatan respons atau	Nota Dinas Juknis	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	ancaman pemutusan kontrak jika layanan tidak sesuai standar.						pada waktu tertentu
34	Melakukan survei kondisi gedung secara berkala (misal setiap 6 bulan) untuk memetakan potensi kerusakan besar, dan menyiapkan dana tak terduga dalam jumlah yang memadai.	Nota Dinas Juknis	Sekretariat	Satuan Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
35	Mewajibkan panitia penerima hasil pekerjaan untuk membuat Laporan Serah Terima Berbasis Dokumentasi Foto & Video dari setiap sudut area yang dikerjakan.	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
36	Memperkuat pengawasan lapangan dengan menugaskan satu pengawas Dinas secara penuh di lokasi proyek, serta menetapkan denda yang berat jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar mutu.	Nota Dinas Juknis Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Tabel 10.
Rancangan Pemantauan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan							
1	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Kepala Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
2	1. Memprioritaskan siswa dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Mengajukan penambahan anggaran untuk beasiswa	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Kepala Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Kepala Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Kepala Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	kepada Semua Pegawai						
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan							
1	Menyelenggarakan workshop rutin khusus untuk operator baru dan sosialisasi perubahan aturan input data	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
2	1. Rekonsiliasi data Dapodik dengan kondisi riil di sekolah 2. Audit berbasis risiko (prioritas sekolah dengan data tidak wajar) 3. Penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing)	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
3	1. Koordinasi berkala dengan pengelola sistem pusat 2. Pengendalian manual sementara jika sistem bermasalah	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
4	1. Melakukan uji beban sistem sebelum PPDB 2. Menambah kapasitas server saat masa puncak 3. Menyediakan server cadangan (backup system)	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
5	1. Validasi silang dengan data kependudukan 2. Pemeriksaan sampel lapangan untuk kasus tertentu 3. Penetapan batas waktu minimal perubahan KK sebelum PPDB	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
6	Menyediakan alternatif jaringan cadangan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
7	1. Membuat checklist pemasangan aman 2. Pemeriksaan fisik sebelum serah terima final 3. Pelatihan singkat kepada sekolah	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
8	1. Survei harga pembanding sebelum pengadaan 2. Pemeriksaan spesifikasi barang secara detail	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
9	Mensyaratkan sertifikat uji laboratorium dari pihak ketiga yang kredibel (misalnya SNI), dan menerapkan sanksi denda yang berat jika kualitas	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	tidak sesuai.						
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar waktu verifikasi 2. Membuat sistem monitoring status berkas 3. Sosialisasi kelengkapan dokumen sebelum pengajuan 	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi silang dengan data kependudukan atau bantuan sosial 2. Pemeriksaan sampel lapangan 	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan lembaga mitra mengisi laporan bulanan dengan rincian penggunaan dana yang sangat detail, termasuk foto dan bukti pembayaran. 2. Menetapkan tim audit internal Dinas untuk melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pembukuan lembaga mitra. 	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
13	Mengadakan pelatihan lanjutan yang wajibkan guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal, dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	Harian (RPPH) berbasis permainan sebelum pelatihan berakhir.						
14	Melakukan wawancara acak (random check) atau kunjungan mendadak ke sekolah yang namanya tercantum dalam laporan uji coba untuk memverifikasi kebenaran laporan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan budayawan/akademisi lokal dalam review 2. Menetapkan standar minimal pelatihan praktik 3. Evaluasi modul sebelum disahkan 	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
16	Wajib menggunakan sistem analisis kebutuhan yang mengukur perbandingan antara beban jam mengajar total dengan jumlah guru per mata pelajaran.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
17	Membuat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat dan guru yang ditempatkan, dan menggunakan sistem acak (random) yang jelas untuk	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	penempatan akhir.						
18	Dinas wajib membentuk tim kecil untuk melakukan uji petik (sampling) minimal 10% dari data yang disajikan mitra untuk membandingkan dengan kondisi riil di lapangan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
19	Mengadakan pelatihan teknis rutin tentang penyusunan dokumen perencanaan bagi semua staf terkait, serta membuat checklist penyusunan dokumen yang wajib ditandatangani.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
20	Membentuk tim audit internal yang bertugas melakukan verifikasi lapangan secara mendadak terhadap sampel data capaian kinerja yang dilaporkan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
21	Mengadakan pertemuan teknis bulanan (formal dan terstruktur) antara staf perencana Dinas Pendidikan dan staf di Bappeda untuk menyamakan persepsi dan	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	prioritas sebelum program final disahkan.						
22	Wajib menggunakan sistem komputerisasi untuk perhitungan gaji, dan setiap input harus diverifikasi oleh atasan menggunakan checklist khusus sebelum diajukan ke bendahara.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
23	Wajib ada audit data tunjangan anak setiap 6 bulan. Bagian Kepegawaian harus meminta bukti terbaru (misalnya surat keterangan belum menikah atau status kuliah) dari setiap anak yang usianya mendekati batas tanggungan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
24	1. Penjadwalan transfer lebih awal sebelum tanggal gajian 2. Mekanisme pengaduan cepat jika terjadi gangguan	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
25	Mewajibkan setiap kendaraan punya kartu kontrol servis yang diisi dan ditandatangani bengkel, lalu dicek oleh atasan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
26	Mewajibkan buku catatan perjalanan (logbook) yang mencantumkan tujuan, jarak tempuh, dan harus ditandatangani atasan setiap selesai tugas.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
27	Pegawai Dinas wajib ikut mengecek suku cadang yang akan dipasang, memastikan ada label keaslian, dan menyimpan sisa suku cadang yang diganti.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
28	Setiap spesifikasi wajib ditinjau dan disetujui oleh petugas yang akan menggunakan barang tersebut (pengguna akhir).	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
29	Wajib ada uji coba fungsi dan pengecekan fisik mendalam (misal: cek nomor seri) untuk memastikan barang benar-benar baru sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
30	Memasukkan klausul (pasal) di kontrak yang menyatakan bahwa penyedia akan langsung	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	diblacklist dan wajib mengganti rugi penuh jika terbukti mengirim barang palsu atau bekas.						
31	Memasang firewall atau aplikasi untuk memprioritaskan traffic pekerjaan dan membatasi akses ke situs yang tidak penting.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
32	Membuat dan menyebarkan surat edaran resmi tentang larangan penggunaan internet kantor untuk hal pribadi, disertai sanksi jika melanggar.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
33	Melakukan evaluasi kontrak dan menambahkan klausul denda keterlambatan respons atau ancaman pemutusan kontrak jika layanan tidak sesuai standar.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
34	Melakukan survei kondisi gedung secara berkala (misal setiap 6 bulan) untuk memetakan potensi kerusakan besar, dan menyiapkan dana tak	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	terduga dalam jumlah yang memadai.						
35	Mewajibkan panitia penerima hasil pekerjaan untuk membuat Laporan Serah Terima Berbasis Dokumentasi Foto & Video dari setiap sudut area yang dikerjakan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
36	Memperkuat pengawasan lapangan dengan menugaskan satu pengawas Dinas secara penuh di lokasi proyek, serta menetapkan denda yang berat jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar mutu.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

BAB VI

PENUTUP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang berkelanjutan, menekankan pada soft control, dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya manusia. Efektivitas pengembangan lingkungan pengendalian sangat bergantung pada keberhasilan penegakan integritas dan etika, serta adanya komitmen dan teladan dari pimpinan tertinggi untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Demikian juga efektivitas identifikasi risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan, judgement, dan komitmen dari seluruh personil dalam organisasi.

Selanjutnya Pelaksanaan Penilaian Resiko disusun sebagai tindak lanjut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 20224 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Lamongan
Megilan

LAMPIRAN
PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2026

Kertas Kerja Strategis OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	2026
Periode yang Dinilai	2026
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
OPD yang dinilai	Dinas Pendidikan
Tujuan Strategis Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Sasaran	2. Terjaminnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan 3. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 4. Meningkatnya manajemen internal Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Resiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk	Sebagian warga usia 15 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan formal tidak mengikuti program pendidikan	RS0.26.01.25.01	Kepala Dinas Pendidikan	1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga	Eksternal	C	1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan	Intansi, Pemda, dan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Resiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		mengikuti pendidikan kesetaraan	kesetaraan							
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	Sebagian peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan	RSO.26.01.25.02	Kepala Dinas Pendidikan	4. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 5. Masih adanya bullying atau tindak kekerasan di sekolah 6. Kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan	Internal	C	4. Angka Harapan Lama Sekolah menurun sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan 5. Banyak pekerja anak di bawah umur 6. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan	Intansi, Pemda, dan Masyarakat
3	Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk	Sebagian guru belum dapat memenuhi persyaratan untuk	RSO.26.01.25.03	Kepala Dinas Pendidikan	3. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 4. Belum	Internal	C	4. Kesejahteraan guru belum meningkat 5. Kualitas guru masih rendah	Intansi, Pemda, Guru, dan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Resiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		mendapatkan sertifikat pendidik	memperoleh sertifikat pendidik			terdaftar pada Dapodik			6.Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan	
4	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tidak mencapai target	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tidak mencapai target	RSO.26.01.25.04	Kepala Dinas Pendidikan	3. SDM yang tidak kompeten 4. Integritas dan etika yang rendah	Internal	C	3.Tidak bisa tercapai pelayanan secara maksimal 4.Akuntabilitas kinerja tidak bisa tercapai dengan baik	Intansi, Pemda, dan Masyarakat

**Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda
Pemerintah Kabupaten Lamongan**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	2026
Periode yang Dinilai	2026
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
Sasaran strategis OPD	2. Terjaminya kualitas dan aksesibilitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan 3. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 4. Meningkatnya manajemen internal Dinas Pendidikan
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
OPD yang Dinilai	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab		C/U C	Dampak		
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 yang berpartisipasi dalam pendidikan SD/MI	Perencanaan	Risiko Operasional: Kesalahan input data Dapodik	Operator sekolah menginput jumlah siswa atau data siswa yang tidak sesuai kondisi sebenarnya	ROO.26.01.25.01	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	3. Operator kurang terlatih atau baru 4. Operator kurang teliti akibat beban kerja tinggi	Internal	C	4. Data tidak akurat 5. Perencanaan tidak tepat 6. Potensi salah hitung dana BOS	Sekolah, Guru dan Siswa, Dinas Pendidikan
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 yang berpartisipasi dalam	Perencanaan	Risiko Fraud: Manipulasi data jumlah siswa di aplikasi Dapodik agar dana BOS yang diterima lebih besar	Oknum di sekolah dengan sengaja menambah jumlah siswa	ROO.26.01.25.02	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	3. Keinginan mendapatkan dana BOS lebih besar 4. Sanksi	Internal	C	4. Kerugian keuangan negara (dana BOS tidak tepat sasaran)	Sekolah, Guru dan Siswa, Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		pendidikan SD/MI			dalam sistem agar dana BOS bertambah			yang tidak tegas atau tidak diterapkan			5. Ketidakalokasian anggaran 6. Sekolah yang jujur justru kekurangan dana	
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 yang berpartisipasi dalam pendidikan SD/MI	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Pengembang aplikasi Dapodik kurang responsif dalam memberikan bantuan teknis	Pengembang sistem lambat merespons laporan kesalahan dari daerah sehingga data tidak bisa diperbaiki tepat waktu	ROO.26.01.25.03	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Ketergantungan pada sistem pusat tanpa alternatif dukungan teknis lokal	Eksternal	C	4. Masalah error pada aplikasi Dapodik tidak teratasi dengan cepat 5. Keterlambatan input data secara nasional/regional 6. Operator sekolah putus asa dan kinerja sekolah terganggu	Sekolah, Guru dan Siswa, Dinas Pendidikan
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah warga negara usia 13-15 yang	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Server PPDB online sering mengalami gangguan	Calon siswa mengakses sistem secara bersamaan,	ROO.26.01.25.04	Bidang Pendidikan SMP dan	Server tidak kuat menampung jumlah	Internal	C	5. Pendaftaran tertunda 6. Data tidak tersimpan	Calon siswa dan orang

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		berpartisipasi dalam pendidikan SMP/MTs			server tidak mampu menampung trafik sehingga sistem tidak bisa diakses		Bidang GTK	pendaftar yang sangat banyak di waktu bersamaan			7. Akses lambat saat puncak pendaftaran 8. Keluhan masyarakat	tua, Sekolah
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah warga negara usia 13-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP/MTs	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Manipulasi data kependudukan (seperti mengubah alamat KK) oleh orang tua calon siswa untuk menghindari aturan zonasi atau mendapatkan kuota afirmasi	Orang tua calon siswa mengubah alamat pada dokumen kependudukan agar masuk zona sekolah favorit	ROO.26.01.25.05	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	4. Keinginan mendapatkan sekolah tertentu 5. Kurangnya verifikasi lapangan 6. Belum ada sanksi yang jelas bagi pemalsu data	Internal	C	4. Tujuan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi tidak tercapai 5. Siswa yang benar-benar berhak (sesuai zonasi/afirmasi) tergeser 6. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem PPDB	Calon siswa dan orang tua, Sekolah
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah warga negara usia 13-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Ketergantungan pada penyedia sistem dan jaringan	Penyedia layanan internet mengalami gangguan saat masa puncak sehingga	ROO.26.01.25.06	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Kapasitas teknis terbatas	Eksternal	C	4. Jaringan yang lambat memperparah risiko server down 5. Proses input data dan	Sekolah, Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		SMP/MTs			sistem PPDB tidak dapat diakses						pendaftaran di sekolah-sekolah menjadi lambat 6. Dinas sulit mengganti mitra saat PPDB sedang berlangsung, sehingga dapat menyebabkan kerugian	
7	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga negara usia 5-6 yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Pemasangan APE (Alat Permainan Edukatif) tidak sesuai prosedur.	Petugas pemasangan atau pihak sekolah memasang APE tanpa mengikuti panduan teknis sehingga alat tidak stabil	ROO.26.01.25.07	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	1. Kurang pemahaman teknis 2. Tidak ada pengawasan pemasangan	Internal	C	APE yang dipasang mudah roboh atau patah, menimbulkan potensi cedera serius pada anak-anak PAUD saat bermain	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan
8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga negara usia 5-6 yang berpartisipasi dalam pendidikan	Perencanaan	Risiko Fraud: Harga APE dinaikkan atau spesifikasi diturunkan	Oknum dalam proses pengadaan bekerja sama dengan penyedia untuk	ROO.26.01.25.08	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	1. Lemahnya pengawasan 2. Tidak ada pembandingan harga	Internal	C	Kerugian uang negara (anggaran terbuang), dan Dinas mendapatkan APE dengan	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		PAUD			menaikkan harga barang						kualitas rendah karena dana yang seharusnya untuk kualitas dipakai untuk mark-up	
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga negara usia 5-6 yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Penyedia mengirim APE yang tidak sesuai standar keselamatan	Penyedia menyerahkan APE dengan bahan atau konstruksi yang tidak kuat dan berpotensi membahayakan anak	ROO.26.01.25.09	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	1. Tidak melakukan uji coba keamanan produk sebelum dikirim 2. Penyedia mengganti bahan yang sudah disepakati di kontrak dengan bahan yang lebih murah	Eksternal	C	APE yang diterima tidak aman (misalnya cat beracun atau sudut tajam), cepat rusak, dan harus sering diganti, yang berarti pemborosan anggaran	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 yang berpartisipasi dalam PNF	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Dana beasiswa terlambat dicairkan	Petugas verifikasi membutuhkan waktu lama memeriksa dokumen sehingga pencairan dana tertunda	ROO.26.01.25.10	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	3. Proses verifikasi dokumen penerima beasiswa memakan waktu lama 4. Dokumen tidak lengkap	Internal	C	3. Peserta didik nonformal kesulitan membayar biaya pendidikan tepat waktu 4. Kualitas proses belajar	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
											terganggu dan peserta didik bisa putus sekolah	
11	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 yang berpartisipasi dalam PNF	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Dokumen atau data ekonomi dipalsukan demi mendapatkan beasiswa	Calon penerima mengubah data penghasilan orang tua agar terlihat tidak mampu	ROO.26.01.25.11	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	3. Ada kesempatan untuk memalsukan data karena proses verifikasi lapangan tidak menyeluruh 4. Kurangnya sanksi tegas bagi pelaku kecurangan	Internal	C	4. Beasiswa salah sasaran dan dinikmati oleh orang yang mampu 5. Peserta didik yang benar-benar membutuhkan beasiswa jadi tidak mendapatkan haknya 6. Kepercayaan publik menurun	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 yang berpartisipasi dalam PNF	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Lembaga nonformal tidak menyampaikan laporan penggunaan dana secara lengkap	Pengelola lembaga tidak melaporkan rincian penggunaan dana beasiswa secara lengkap	ROO.26.01.25.12	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Kurangnya pemahaman lembaga terkait pelaporan penggunaan dana	Eksternal	C	3. Sulit memastikan penggunaan dana 4. Ada potensi dana beasiswa disalahgunakan oleh	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak		
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
												pihak lembaga (misalnya untuk keperluan operasional lembaga, bukan untuk peserta didik)	
13	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal yang berlaku	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Guru PAUD kesulitan menerjemahkan kurikulum Mulok ke dalam bentuk permainan	Guru PAUD menerima modul Mulok tetapi tidak memahami cara mengubahnya menjadi kegiatan bermain yang sesuai usia anak	ROO.26.01.25.13	Bidang PAUD/ Nonformal, dan Bidang GTK	Kurikulum muatan lokal (mulok) yang dibuat terlalu bersifat teori dan tidak dilengkapi contoh praktis bagaimana cara mengajarkannya melalui kegiatan bermain	Internal	C	Materi mulok tidak tersampaikan dengan baik kepada anak, sehingga tujuan pembelajaran (misalnya melestarikan budaya lokal) tidak tercapai	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan	
14	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal yang	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Penyedia bahan ajar memalsukan laporan uji coba atau penilaian guru	Penyedia modul melaporkan bahwa guru sudah menguji dan menyetujui materi,	ROO.26.01.25.14	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Ingin mempercepat pembayaran atau pengesahan modul	Internal	C	Kurikulum yang ditetapkan tidak cocok dengan kebutuhan anak	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		berlaku			padahal uji coba belum dilakukan secara nyata							
15	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal yang berlaku	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Mitra menyerahkan modul yang tidak sesuai budaya lokal Lamongan dan tidak memberi pelatihan memadai	Mitra menyerahkan modul umum yang tidak menggambarkan budaya Lamongan dan hanya memberi pelatihan singkat tanpa praktik	ROO.26.01.25.15	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Mitra penyusun kurikulum tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek, hanya mengejar deadline, dan pelatihan yang diberikan sekadar formalitas	Internal	C	Dana yang dikeluarkan Dinas untuk menyusun kurikulum dan pelatihan terbuang sia-sia. Guru tetap bingung, dan isi kurikulum tidak dapat diterapkan	Siswa, Sekolah, Dinas Pendidikan
16	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang naik jabatan tepat waktu	Perencanaan	Risiko Operasional: Pengajuan formasi ASN tidak sesuai analisis kebutuhan	Tim perencana mengajukan jumlah formasi guru tanpa memperbarui data rasio guru dan rombongan terbaru	ROO.26.01.25.16	Bidang GTK	Data tidak diperbarui, koordinasi lemah, tekanan waktu	Internal	C	4. Terjadi kelebihan guru di satu wilayah 5. Terjadi kekurangan guru di wilayah lain 6. Pemerataan tidak tercapai	Sekolah, Dinas Pendidikan
17	Pemerataan	Jumlah	Perencanaan	Risiko Fraud: Terjadi	Oknum	ROO.26.01.25.	Bidang	Ada oknum	Internal	C	Penempatan	Sekolah,

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	pendidik dan tenaga kependidikan yang naik jabatan tepat waktu	an	praktik suap atau kecurangan dalam penempatan guru berstatus ASN	menawarkan imbalan kepada pejabat agar ditempatkan di sekolah tertentu	17	GTK	pejabat atau panitia yang menawarkan penempatan di sekolah favorit dengan imbalan uang (suap) atau bantuan khusus			guru tidak berdasarkan kebutuhan sekolah, tapi berdasarkan uang. Hal ini merusak keadilan dan motivasi guru yang jujur	Dinas Pendidikan
18	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang naik jabatan tepat waktu	Perencanaan	Risiko Kemitraan: Lembaga mitra yang ditunjuk untuk melakukan analisis kebutuhan GTK (penelitian/konsultasi) memberikan data yang tidak akurat kepada Dinas	Konsultan menyusun laporan kebutuhan guru tanpa survei lapangan yang memadai	ROO.26.01.25.18	Bidang GTK	Lembaga mitra yang dikontrak untuk melakukan analisis kebutuhan ASN (pegawai) tidak bekerja serius atau hanya menyalin data lama demi menyelesaikan kontrak	Eksternal	C	Formasi salah dan distribusi tidak merata	Sekolah, Dinas Pendidikan
19	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Perencanaan	Risiko Operasional: Dokumen perencanaan terlambat diselesaikan	Subbag Perencanaan belum menyelesaikan dokumen perencanaan tepat waktu	ROO.26.01.25.19	Sekretariat	4. Staf yang menyusun dokumen memiliki beban kerja ganda	Internal	C	Anggaran dan kegiatan program Dinas menjadi terlambat dilaksanakan di awal tahun,	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		tepat waktu			karena data dari bidang terlambat masuk			5. Melibatkan banyak bidang dan data 6. Panduan penyusunan dokumen berubah-ubah			sehingga target kinerja tahunan sulit tercapai	
20	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Pelaporan	Risiko Fraud: Manipulasi data capaian kinerja dalam laporan agar terlihat bagus	Pejabat melakukan atau diminta menaikkan angka capaian dalam laporan agar indikator terlihat tercapai	ROO.26.01.25.20	Sekretariat	Tekanan agar target terlihat tercapai	Internal	C	Laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya	Dinas Pendidikan
21	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Perencanaan	Risiko Kemitraan : Ketidaksinkronan prioritas antara Dinas Pendidikan dengan Bappeda	Dinas Pendidikan mengusulkan program yang ternyata tidak menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah sehingga harus direvisi	ROO.26.01.25.21	Sekretariat	Kurangnya koordinasi dan komunikasi formal di tingkat teknis saat penyusunan rencana program, sehingga Dinas dan Bappeda memiliki fokus	Eksternal	C	4. Revisi berulang 5. Keterlambatan dokumen 6. Potensi pengurangan anggaran	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
									berbeda.			
22	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Terjadi kesalahan dalam penginputan data gaji atau tunjangan	Petugas keuangan salah menginput data gaji atau tunjangan sehingga nilai yang dibayarkan tidak sesuai	ROO.26.01.25.22	Sekretariat	Pegawai yang menginput data kurang teliti atau terburu-buru, atau sistem input data yang digunakan masih manual dan rentan salah ketik	Internal	C	Pegawai menerima gaji/tunjangan yang jumlahnya salah (kelebihan atau kekurangan), yang bisa menimbulkan protes, ketidakpuasan, atau kerugian keuangan Dinas/negara	Dinas Pendidikan
23	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Pegawai tetap menerima tunjangan anak meskipun tidak lagi memenuhi syarat (anak sudah lulus kuliah/menikah/berusia >21/25 tahun)	Pegawai tidak melaporkan bahwa anaknya sudah menikah atau melebihi batas usia sehingga tunjangan tetap dibayarkan	ROO.26.01.25.23	Sekretariat	Pegawai tidak melaporkan perubahan status anak (lulus sekolah, menikah, atau usia melebihi batas) agar tunjangan tetap dibayarkan	Internal	C	Kelebihan bayar dan potensi temuan audit	Dinas Pendidikan
24	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Sistem bank mengalami gangguan saat proses transfer gaji	Sistem perbankan error pada hari pencairan sehingga sebagian pegawai	ROO.26.01.25.24	Sekretariat	Sistem di Bank yang menjadi mitra pembayaran gaji mengalami gangguan	Eksternal	C	Proses transfer dana atau pencairan gaji mengalami keterlambatan	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					belum menerima gaji			teknis atau adanya perbaikan sistem Bank yang tidak diumumkan sebelumnya				
25	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang tersedia dengan baik	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai jadwal atau standar teknis	Pengelola kendaraan menunda servis berkala sehingga kendaraan mengalami kerusakan berat	ROO.26.01.25.25	Sekretariat	4. Kurangnya pengawasan 5. Tidak ada jadwal servis tertulis 6. Keterbatasan anggaran	Internal	C	4. Kendaraan rusak 5. Biaya perbaikan meningkat 6. Kegiatan dinas terganggu	Dinas Pendidikan
26	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang tersedia dengan baik	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi atau disewakan	Pegawai menggunakan kendaraan dinas untuk liburan keluarga tanpa izin	ROO.26.01.25.26	Sekretariat	4. Kurangnya sanksi yang tegas 5. Tidak ada buku catatan perjalanan/logbook 6. Pengawasan atasan yang lemah	Internal	C	4. Pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinas 5. Peningkatan keausan kendaraan 6. Rusaknya citra pegawai/dinas di mata publik	Dinas Pendidikan
27	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Bengkel mengganti suku cadang asli dengan yang tidak	Bengkel rekanan memasang suku cadang	ROO.26.01.25.27	Sekretariat	Kurangnya pemeriksaan suku cadang saat	Internal	C	3. Kendaraan cepat rusak 4. Pemborosan	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		tersedia dengan baik		asli	kualitas rendah tetapi menagih harga suku cadang asli			pemasangan, atau ada kolusi (kerja sama curang) antara oknum pegawai dan bengkel.			anggaran	
28	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak pakai	Perencanaan	Risiko Operasional: Spesifikasi barang tidak sesuai kebutuhan	Pejabat perencana menyusun spesifikasi tanpa konsultasi dengan pengguna sehingga barang tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.01.25.28	Sekretariat	Petugas yang membuat spesifikasi kurang mengerti kebutuhan teknis, atau spesifikasi dibuat terlalu umum (tidak detail).	Internal	C	Barang yang dibeli tidak bisa dipakai atau fungsinya tidak maksimal, sehingga harus dibeli ulang dan menyebabkan kerugian anggaran	Dinas Pendidikan
29	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak pakai	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Petugas penerima menerima barang bekas/rekondisi yang diakui sebagai barang baru	Petugas penerima tidak memeriksa fisik barang secara detail atau sengaja menerima barang bekas	ROO.26.01.25.29	Sekretariat	3. Adanya kesepakatan curang antara petugas penerima barang dan penyedia 4. Kurang telitinya panitia saat memeriksa barang yang	Internal	C	4. Kualitas barang cepat menurun 5. Barang cepat rusak 6. Mengurangi masa pakai yang seharusnya bisa lebih lama	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
									datang			
30	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak pakai	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Penyedia tidak mengirim barang lengkap atau mengirim barang palsu/bekas	Penyedia mengirim barang kualitas rendah atau tidak lengkap untuk menekan biaya	ROO.26.01.25.30	Sekretariat	3. Lemahnya pengawasan terhadap proses pengiriman barang oleh penyedia 4. Kontrak tidak mencantumkan sanksi yang berat jika barang palsu/bekas dikirim	Internal	C	4. Pekerjaan dinas terhambat karena barang tidak lengkap 5. Harus menunggu pengiriman ulang 6. Kualitas rendah	Dinas Pendidikan
31	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan baik	Pelaksanaan	Risiko Operasional: WiFi kantor lambat saat jam kerja sehingga menghambat input data dan layanan administrasi	Pegawai tidak dapat menginput data atau mengirim laporan karena koneksi sangat lambat	ROO.26.01.25.31	Sekretariat	3. Penggunaan jaringan berlebihan (misalnya banyak pegawai mengakses video atau download besar) 4. Kapasitas internet yang dibeli terlalu kecil	Internal	C	3. Pekerjaan dinas (pengiriman data, meeting online, pelayanan publik) menjadi sangat lambat dan terhambat 4. Mengurangi kecepatan	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
											kerja	
32	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan baik	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Pegawai menggunakan WiFi kantor untuk kepentingan pribadi (streaming, unduhan besar, bisnis pribadi)	Oknum pegawai mengunduh film atau menjalankan bisnis pribadi menggunakan WiFi kantor saat jam kerja	ROO.26.01.25.32	Sekretariat	Pegawai merasa tidak ada pengawasan, atau tidak ada aturan yang melarang penggunaan internet untuk kepentingan pribadi.	Internal	C	3. Menghabiskan kuota internet kantor yang dibayar negara 4. Jaringan menjadi lemot bagi pegawai yang benar-benar bekerja	Dinas Pendidikan
33	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan baik	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Penyedia internet lambat merespons gangguan atau kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan	Penyedia internet tidak segera memperbaiki gangguan meskipun sudah dilaporkan	ROO.26.01.25.33	Sekretariat	Standar pelayanan (SLA) dalam kontrak dengan penyedia internet tidak ketat atau tidak mencantumkan batas waktu perbaikan yang jelas	Eksternal	C	Jika internet rusak, layanan publik dan pekerjaan Dinas bisa terhenti karena perbaikan yang berlarut-larut	Dinas Pendidikan
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang	Persentase Barang Milik	Perencanaan	Risiko Operasional: Dana pemeliharaan habis di	Banyak sekolah melaporkan	ROO.26.01.25.34	Sekretariat	3. Hasil perbaikan sebelumnya	Internal	C	4. Gedung kantor atau sekolah yang	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	urusan pemerintahan daerah	Daerah yang layak pakai		pertengahan tahun karena banyak kerusakan tak terduga	kerusakan berat di luar perkiraan sehingga dana pemeliharaan terserap lebih cepat			a kurang baik 4. Kerusakan yang tidak terprediksi (misalnya banjir atau kebocoran atap saat musim hujan)			rusak parah tidak bisa diperbaiki hingga tahun anggaran berikutnya 5. Mengganggu kegiatan belajar/kerja 6. Membahayakan pengguna	
35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang layak pakai	Perencanaan	Risiko Fraud: Anggaran pengecatan gedung dicairkan, tapi yang dicat hanya bagian depan saja	Staf keuangan menyetujui klaim pengecatan tanpa melakukan audit atau inspeksi menyeluruh	ROO.26.01.25.35	Sekretariat	3. Panitia penerima hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh (hanya mengecek bagian yang terlihat) 4. Adanya kerja sama curang antara panitia dan kontraktor	Internal	C	Kerugian keuangan daerah dan bangunan cepat rusak	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko					Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang layak pakai	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Penyedia jasa bekerja asal-asalan sehingga hasil perbaikan cepat rusak	Tukang atau penyedia jasa bekerja asal-asalan sehingga cat mengelupas atau perbaikan retak kembali dalam waktu singkat	ROO.26.01.25.36	Sekretariat	Kontraktor hanya mencari untung besar dengan menggunakan bahan murah dan tenaga kerja yang tidak terampil (tidak profesional).	Eksternal	C	Hasil rehabilitasi gedung jelek, cepat rusak, dan umur pakainya pendek, sehingga Dinas harus menganggarkan biaya perbaikan lagi dalam waktu singkat.	Dinas Pendidikan

**Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan
Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya budaya yang toleran terhadap pelanggaran yaitu "budaya diam" atau normalisasi terhadap perilaku tidak etis 2. Masih adanya pegawai tidak memahami dengan jelas batasan perilaku yang diperbolehkan 3. Pelanggaran aturan perilaku/kode etik ditindaklanjuti masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan etika berkala, kampanye anti budaya diam, kanal aduan aman dan rahasia, serta penghargaan bagi pelapor berintegritas. 2. Sosialisasi ulang kode etik, penyusunan buku saku etika, dan integrasi dalam orientasi pegawai baru. 3. Pembentukan tim kepatuhan independen serta transparansi penanganan pelanggaran secara umum untuk meningkatkan efek jera dan kesadaran kolektif. 	Kepala Dinas Pendidikan	2026
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi dana tidak memadai untuk pelatihan dan pengembangan 2. Penugasan tidak selaras dengan kompetensi dan keahlian 3. Keengganan mempelajari keterampilan dan teknologi baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan berbasis narasumber internal dan kerja sama dengan BPSDM/PPPPTK/universitas, serta memanfaatkan program gratis/bersubsidi dari Kemendikbudristek/LAN. 2. Pemetaan kompetensi berbasis SKP dan latar belakang, disertai pelatihan penunjang bila ada ketidaksesuaian. 3. Pelatihan adaptasi digital secara bertahap dan praktik langsung (Ms. Excel, e-Office, Dapodik, dll). 	Kepala Dinas Pendidikan	2026
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya zona nyaman sehingga terhambatnya sebuah inovasi dan perubahan yang diperlukan 2. Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan rutin inovasi serta pemberian penghargaan bagi pegawai yang berinovasi. 2. Melatih pegawai terkait penerapan 	Kepala Dinas Pendidikan	2026

	pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan tapi belum terlaksana secara konsisten	manajemen risiko dan pengendalian internal (SPIP).		
4	1. Keterbatasan SDM 2. Tidak Semua pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap tetapi masih ada pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	1. Mendorong kolaborasi antarbidang/subbagian dalam penyelesaian pekerjaan. 2. Memfasilitasi pegawai adhoc mengikuti seleksi CPNS/PPPK agar menjadi pegawai tetap.	Kepala Dinas Pendidikan	2026
5	Masih ada kriteria pendelegasian wewenang ditentukan belum secara tepat	Mengkaji SOP, uraian tugas, dan struktur organisasi untuk menentukan tugas dan fungsi yang dapat didelegasikan.	Kepala Dinas Pendidikan	2026
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, tetapi belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Membentuk tim lintas subbagian untuk mengintegrasikan evaluasi kinerja pegawai ke dalam perhitungan tunjangan kinerja guna mendorong kinerja optimal dan budaya kerja produktif.	Kepala Dinas Pendidikan	2026
7	APIP belum memahami sepenuhnya bagaimana dalam melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Mengadakan sosialisasi dan workshop pengawasan berbasis risiko dengan narasumber dari BPKP atau Inspektorat Provinsi.	Kepala Dinas Pendidikan	2026
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun hanya saja perlu adanya mekanisme tindak lanjut temuan	Membentuk tim lintas bidang untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan.	Kepala Dinas Pendidikan	2026

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2026
Nama OPD	Dinas Pendidikan

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan							
1	Dinas Pendidikan	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.26.01.25.01	11	Kepala Dinas Pendidikan	3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 4. Banyak yang sudah berkeluarga	1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan
2	Dinas Pendidikan	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.26.01.25.02	9	Kepala Dinas Pendidikan	1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. Kurangnya	1. Angka Harapan Lama Sekolah menurun sehingga tidak mencapai target yang telah di tetapkan 2. Banyak pekerja anak di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
						kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan	kemiskinan
3	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik	RSO.26.01.25.03	12	Kepala Dinas Pendidikan	1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik	1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan
4	Dinas Pendidikan	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tidak mencapai target	RSO.26.01.25.04	10	Kepala Dinas Pendidikan	3. SDM yang tidak berkompeten 4. Integritas dan etika yang rendah	1. Tidak bisa tercapai pelayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas kinerja tidak bisa tercapai dengan baik
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan							
1	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Kesalahan input data Dapodik	ROO.26.01.25.01	9	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	1. Operator kurang terlatih atau baru 2. Operator kurang teliti akibat beban kerja tinggi	1. Data tidak akurat 2. Perencanaan tidak tepat 3. Potensi salah hitung dana BOS
2	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Manipulasi data jumlah siswa di aplikasi Dapodik agar dana BOS yang diterima lebih besar	ROO.26.01.25.02	9	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	1. Keinginan mendapatkan dana BOS lebih besar 2. Sanksi yang tidak tegas atau tidak diterapkan	4. Kerugian keuangan negara (dana BOS tidak tepat sasaran) 5. Ketidakadilan alokasi anggaran 6. Sekolah yang jujur

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
							justru kekurangan dana
3	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Pengembang aplikasi Dapodik kurang responsif dalam memberikan bantuan teknis	ROO.26.01.25.03	10	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Ketergantungan pada sistem pusat tanpa alternatif dukungan teknis lokal	<ul style="list-style-type: none"> 4. Masalah error pada aplikasi Dapodik tidak teratasi dengan cepat 5. Keterlambatan input data secara nasional/regional 6. Operator sekolah putus asa dan kinerja sekolah terganggu
4	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Server PPDB online sering mengalami gangguan	ROO.26.01.25.04	9	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Server tidak kuat menampung jumlah pendaftar yang sangat banyak di waktu bersamaan	<ul style="list-style-type: none"> 5. Pendaftaran tertunda 6. Data tidak tersimpan 7. Akses lambat saat puncak pendaftaran 8. Keluhan masyarakat
5	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Manipulasi data kependudukan (seperti mengubah alamat KK) oleh orang tua calon siswa untuk menghindari aturan zonasi atau mendapatkan kuota afirmasi	ROO.26.01.25.05	10	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	<ul style="list-style-type: none"> 4. Keinginan mendapatkan sekolah tertentu 5. Kurangnya verifikasi lapangan 6. Belum ada sanksi yang jelas bagi pemalsu data 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Tujuan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi tidak tercapai 5. Siswa yang benar-benar berhak (sesuai zonasi/afirmasi) tergeser 6. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem PPDB

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
6	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Ketergantungan pada penyedia sistem dan jaringan	ROO.26.01.25.06	10	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Kapasitas teknis terbatas	<ul style="list-style-type: none"> 4. Jaringan yang lambat memperparah risiko server down 5. Proses input data dan pendaftaran di sekolah-sekolah menjadi lambat 6. Dinas sulit mengganti mitra saat PPDB sedang berlangsung, sehingga dapat menyebabkan kerugian
7	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Pemasangan APE (Alat Permainan Edukatif) tidak sesuai prosedur.	ROO.26.01.25.07	11	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	<ul style="list-style-type: none"> 3. Kurang pemahaman teknis 4. Tidak ada pengawasan pemasangan 	APE yang dipasang mudah roboh atau patah, menimbulkan potensi cedera serius pada anak-anak PAUD saat bermain
8	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Harga APE dinaikkan atau spesifikasi diturunkan	ROO.26.01.25.08	8	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	<ul style="list-style-type: none"> 3. Lemahnya pengawasan 4. Tidak ada pembandingan harga 	Kerugian uang negara (anggaran terbuang), dan Dinas mendapatkan APE dengan kualitas rendah karena dana yang seharusnya untuk kualitas dipakai untuk mark-up
9	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Penyedia mengirim APE yang tidak sesuai standar keselamatan	ROO.26.01.25.09	10	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	<ul style="list-style-type: none"> 3. Tidak melakukan uji coba keamanan produk sebelum dikirim 4. Penyedia mengganti bahan yang sudah disepakati di 	APE yang diterima tidak aman (misalnya cat beracun atau sudut tajam), cepat rusak, dan harus sering diganti, yang berarti pemborosan anggaran

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
						kontrak dengan bahan yang lebih murah	
10	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Dana beasiswa terlambat dicairkan	ROO.26.01.25.10	9	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	3. Proses verifikasi dokumen penerima beasiswa memakan waktu lama 4. Dokumen tidak lengkap	3. Peserta didik nonformal kesulitan membayar biaya pendidikan tepat waktu 4. Kualitas proses belajar terganggu dan peserta didik bisa putus sekolah
11	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Dokumen atau data ekonomi dipalsukan demi mendapatkan beasiswa	ROO.26.01.25.11	10	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	3. Ada kesempatan untuk memalsukan data karena proses verifikasi lapangan tidak menyeluruh 4. Kurangnya sanksi tegas bagi pelaku kecurangan	4. Beasiswa salah sasaran dan dinikmati oleh orang yang mampu 5. Peserta didik yang benar-benar membutuhkan beasiswa jadi tidak mendapatkan haknya 6. Kepercayaan publik menurun
12	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Lembaga nonformal tidak menyampaikan laporan penggunaan dana secara lengkap	ROO.26.01.25.12	10	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Kurangnya pemahaman lembaga terkait pelaporan penggunaan dana	3. Sulit memastikan penggunaan dana 4. Ada potensi dana beasiswa disalahgunakan oleh pihak lembaga (misalnya untuk keperluan operasional lembaga, bukan untuk

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
							peserta didik)
13	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Guru PAUD kesulitan menerjemahkan kurikulum Mulok ke dalam bentuk permainan	ROO.26.01.25.13	10	Bidang PAUD/ Nonformal, dan Bidang GTK	Kurikulum muatan lokal (mulok) yang dibuat terlalu bersifat teori dan tidak dilengkapi contoh praktis bagaimana cara mengajarkannya melalui kegiatan bermain	Materi mulok tidak tersampaikan dengan baik kepada anak, sehingga tujuan pembelajaran (misalnya melestarikan budaya lokal) tidak tercapai
14	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Penyedia bahan ajar memalsukan laporan uji coba atau penilaian guru	ROO.26.01.25.14	10	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Ingin mempercepat pembayaran atau pengesahan modul	Kurikulum yang ditetapkan tidak cocok dengan kebutuhan anak
15	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Mitra menyerahkan modul yang tidak sesuai budaya lokal Lamongan dan tidak memberi pelatihan memadai	ROO.26.01.25.15	9	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Mitra penyusun kurikulum tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek, hanya mengejar deadline, dan pelatihan yang diberikan sekadar formalitas	Dana yang dikeluarkan Dinas untuk menyusun kurikulum dan pelatihan terbuang sia-sia. Guru tetap bingung, dan isi kurikulum tidak dapat diterapkan
16	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Pengajuan formasi ASN tidak sesuai analisis kebutuhan	ROO.26.01.25.16	9	Bidang GTK	Data tidak diperbarui, koordinasi lemah, tekanan waktu	4. Terjadi kelebihan guru di satu wilayah 5. Terjadi kekurangan guru di wilayah lain 6. Pemerataan tidak

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
							tercapai
17	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Terjadi praktik suap atau kecurangan dalam penempatan guru berstatus ASN	ROO.26.01.25.17	9	Bidang GTK	Ada oknum pejabat atau panitia yang menawarkan penempatan di sekolah favorit dengan imbalan uang (suap) atau bantuan khusus	Penempatan guru tidak berdasarkan kebutuhan sekolah, tapi berdasarkan uang. Hal ini merusak keadilan dan motivasi guru yang jujur
18	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Lembaga mitra yang ditunjuk untuk melakukan analisis kebutuhan GTK (penelitian/konsultan) memberikan data yang tidak akurat kepada Dinas	ROO.26.01.25.18	9	Bidang GTK	Lembaga mitra yang dikontrak untuk melakukan analisis kebutuhan ASN (pegawai) tidak bekerja serius atau hanya menyalin data lama demi menyelesaikan kontrak	Formasi salah dan distribusi tidak merata
19	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Dokumen perencanaan terlambat diselesaikan	ROO.26.01.25.19	9	Sekretariat	4. Staf yang menyusun dokumen memiliki beban kerja ganda 5. Melibatkan banyak bidang dan data 6. Panduan penyusunan dokumen berubah-ubah	Anggaran dan kegiatan program Dinas menjadi terlambat dilaksanakan di awal tahun, sehingga target kinerja tahunan sulit tercapai
20	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Manipulasi data capaian kinerja dalam laporan agar terlihat bagus	ROO.26.01.25.20	9	Sekretariat	Tekanan agar target terlihat tercapai	Laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya
21	Dinas	Risiko Kemitraan :	ROO.26.01.25.21	10	Sekretariat	Kurangnya koordinasi	4. Revisi berulang

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Pendidikan	Ketidaksinkronan prioritas antara Dinas Pendidikan dengan Bappeda				dan komunikasi formal di tingkat teknis saat penyusunan rencana program, sehingga Dinas dan Bappeda memiliki fokus berbeda	5. Keterlambatan dokumen 6. Potensi pengurangan anggaran
22	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Terjadi kesalahan dalam penginputan data gaji atau tunjangan	ROO.26.01.25.22	9	Sekretariat	Pegawai yang menginput data kurang teliti atau terburu-buru, atau sistem input data yang digunakan masih manual dan rentan salah ketik	Pegawai menerima gaji/tunjangan yang jumlahnya salah (kelebihan atau kekurangan), yang bisa menimbulkan protes, ketidakpuasan, atau kerugian keuangan Dinas/negara
23	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Pegawai tetap menerima tunjangan anak meskipun tidak lagi memenuhi syarat (anak sudah lulus kuliah/menikah/berusia >21/25 tahun)	ROO.26.01.25.23	10	Sekretariat	Pegawai tidak melaporkan perubahan status anak (lulus sekolah, menikah, atau usia melebihi batas) agar tunjangan tetap dibayarkan	Kelebihan bayar dan potensi temuan audit
24	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Sistem bank mengalami gangguan saat proses transfer gaji	ROO.26.01.25.24	9	Sekretariat	Sistem di Bank yang menjadi mitra pembayaran gaji mengalami gangguan teknis atau adanya perbaikan sistem Bank yang tidak diumumkan sebelumnya	Proses transfer dana atau pencairan gaji mengalami keterlambatan

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
25	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai jadwal atau standar teknis	ROO.26.01.25.25	9	Sekretariat	4. Kurangnya pengawasan 5. Tidak ada jadwal servis tertulis 6. Keterbatasan anggaran	4. Kendaraan rusak 5. Biaya perbaikan meningkat 6. Kegiatan dinas terganggu
26	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi atau disewakan	ROO.26.01.25.26	10	Sekretariat	4. Kurangnya sanksi yang tegas 5. Tidak ada buku catatan perjalanan/ logbook 6. Pengawasan atasan yang lemah	4. Pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinas 5. Peningkatan keausan kendaraan 6. Rusaknya citra pegawai/dinas di mata publik
27	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Bengkel mengganti suku cadang asli dengan yang tidak asli	ROO.26.01.25.27	10	Sekretariat	Kurangnya pemeriksaan suku cadang saat pemasangan, atau ada kolusi (kerja sama curang) antara oknum pegawai dan bengkel	3. Kendaraan cepat rusak 4. Pemborosan anggaran
28	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Spesifikasi barang tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.01.25.28	9	Sekretariat	Petugas yang membuat spesifikasi kurang mengerti kebutuhan teknis, atau spesifikasi dibuat terlalu umum (tidak detail).	Barang yang dibeli tidak bisa dipakai atau fungsinya tidak maksimal, sehingga harus dibeli ulang dan menyebabkan kerugian anggaran
29	Dinas	Risiko Fraud: Petugas	ROO.26.01.25.29	9	Sekretariat	3. Adanya	4. Kualitas barang cepat

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Pendidikan	penerima menerima barang bekas/rekondisi yang diakui sebagai barang baru				<p>kesepakatan curang antara petugas penerima barang dan penyedia</p> <p>4. Kurang telitinya panitia saat memeriksa barang yang datang</p>	<p>menurun</p> <p>5. Barang cepat rusak</p> <p>6. Mengurangi masa pakai yang seharusnya bisa lebih lama</p>
30	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Penyedia tidak mengirim barang lengkap atau mengirim barang palsu/bekas	ROO.26.01.25.30	9	Sekretariat	<p>3. Lemahnya pengawasan terhadap proses pengiriman barang oleh penyedia</p> <p>4. Kontrak tidak mencantumkan sanksi yang berat jika barang palsu/bekas dikirim</p>	<p>4. Pekerjaan dinas terhambat karena barang tidak lengkap</p> <p>5. Harus menunggu pengiriman ulang</p> <p>6. Kualitas rendah</p>
31	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: WiFi kantor lambat saat jam kerja sehingga menghambat input data dan layanan administrasi	ROO.26.01.25.31	11	Sekretariat	<p>3. Penggunaan jaringan berlebihan (misalnya banyak pegawai mengakses video atau download besar)</p> <p>4. Kapasitas internet yang dibeli terlalu kecil</p>	<p>3. Pekerjaan dinas (pengiriman data, meeting online, pelayanan publik) menjadi sangat lambat dan terhambat</p> <p>4. Mengurangi kecepatan kerja</p>
32	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Pegawai menggunakan WiFi kantor untuk kepentingan pribadi (streaming, unduhan besar,	ROO.26.01.25.32	9	Sekretariat	Pegawai merasa tidak ada pengawasan, atau tidak ada aturan yang melarang penggunaan	<p>3. Menghabiskan kuota internet kantor yang dibayar negara</p> <p>4. Jaringan menjadi lemot</p>

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		bisnis pribadi)				internet untuk kepentingan pribadi	bagi pegawai yang benar-benar bekerja
33	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Penyedia internet lambat merespons gangguan atau kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.01.25.33	10	Sekretariat	Standar pelayanan (SLA) dalam kontrak dengan penyedia internet tidak ketat atau tidak mencantumkan batas waktu perbaikan yang jelas	Jika internet rusak, layanan publik dan pekerjaan Dinas bisa terhenti karena perbaikan yang berlarut-larut
34	Dinas Pendidikan	Risiko Operasional: Dana pemeliharaan habis di pertengahan tahun karena banyak kerusakan tak terduga	ROO.26.01.25.34	9	Sekretariat	3. Hasil perbaikan sebelumnya kurang baik 4. Kerusakan yang tidak terprediksi (misalnya banjir atau kebocoran atap saat musim hujan)	4. Gedung kantor atau sekolah yang rusak parah tidak bisa diperbaiki hingga tahun anggaran berikutnya 5. Mengganggu kegiatan belajar/kerja 6. Membahayakan pengguna
35	Dinas Pendidikan	Risiko Fraud: Anggaran pengecatan gedung dicairkan, tapi yang dicat hanya bagian depan saja	ROO.26.01.25.35	9	Sekretariat	3. Panitia penerima hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh (hanya mengecek bagian yang terlihat) 4. Adanya kerja sama curang antara panitia dan	Kerugian keuangan daerah dan bangunan cepat rusak

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
						kontraktor	
36	Dinas Pendidikan	Risiko Kemitraan: Penyedia jasa bekerja asal-asalan sehingga hasil perbaikan cepat rusak	ROO.26.01.25.36	8	Sekretariat	Kontraktor hanya mencari untung besar dengan menggunakan bahan murah dan tenaga kerja yang tidak terampil (tidak profesional).	Hasil rehabilitasi gedung jelek, cepat rusak, dan umur pakainya pendek, sehingga Dinas harus menganggarkan biaya perbaikan lagi dalam waktu singkat

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2026
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
Resiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:									
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.26.01.25.01	Pendataan masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal	Banyaknya penduduk Lamongan yang berdomisili di luar Kabupaten Lamongan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang PNF	Januari - Desember 2026		
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.26.01.25.2	Memberikan Beasiswa PERINTIS untuk peserta didik dari keluarga miskin dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi	Keterbatasan Anggaran sehingga masih ada peserta didik yang memenuhi syarat tapi belum mendapatkan beasiswa	3. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 4. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026		
3	Masih terdapat guru	RSO.26.01.25.3	3. Memberikan	3. Kurangnya	1. Memberi	Kepala	Januari -		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
	yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik		program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 4. Melakukan sosialisasi pada guru akan pentingnya sertifikat pendidik	minat guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1/D4 4. Masih banyak guru yang belum masuk di aplikasi Dapodik	pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang GTK	Desember 2026		
4	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tidak mencapai target	RSO.26.01.25.4	3. Perbup No. 29 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 4. Program Pelatihan dan BIMTEK SAKIP	Masih terdapat kualitas SDM yang belum memenuhi standar	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
Resiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:									
1	Risiko Operasional: Kesalahan input data Dapodik	ROO.26.01.25.01	Pelatihan operator sekolah dan chat WhatsApp untuk tanya jawab teknis	Pelatihan belum rutin dan belum diikuti oleh semua operator baru	Menyelenggarakan workshop rutin khusus untuk operator baru dan sosialisasi perubahan aturan input data	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
2	Risiko Fraud: Manipulasi data jumlah siswa di aplikasi Dapodik agar dana BOS yang diterima lebih besar	ROO.26.01.25.02	4. Audit internal 5. Laporan penggunaan dana BOS 6. Monitoring oleh tim BOS kabupaten	1. Audit belum berbasis analisis risiko 2. Tidak semua sekolah diperiksa secara mendalam 3. Sistem sulit mendeteksi jika siswa tersebut ada di data tapi fisiknya tidak pernah sekolah.	4. Rekonsiliasi data Dapodik dengan kondisi riil di sekolah 5. Audit berbasis risiko (prioritas sekolah dengan data tidak wajar) 6. Penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing)	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
3	Risiko Kemitraan: Pengembang aplikasi Dapodik kurang responsif dalam	ROO.26.01.25.03	3. Pelaporan kendala melalui kanal resmi 4. Koordinasi	1. Tidak ada batas waktu respon yang pasti	3. Koordinasi berkala dengan pengelola sistem pusat	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
	memberikan bantuan teknis		melalui forum admin Dapodik	2. Daerah tidak bisa memperbaiki sistem secara mandiri	4. Pengendalian manual sementara jika sistem bermasalah				
4	Risiko Operasional: Server PPDB online sering mengalami gangguan	ROO.26.01.25.04	4. Penjadwalan waktu pendaftaran 5. Monitoring server selama PPDB 6. Tim teknis siaga saat masa pendaftaran	1. Belum ada uji beban (stress test) sebelum PPDB 2. Kapasitas server belum disesuaikan dengan jumlah pendaftar 3. Tidak ada server cadangan	1. Melakukan uji beban sistem sebelum PPDB 2. Menambah kapasitas server saat masa puncak 3. Menyediakan server cadangan (backup system)	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
5	Risiko Fraud: Manipulasi data kependudukan (seperti mengubah alamat KK) oleh orang tua calon siswa untuk menghindari aturan zonasi atau mendapatkan kuota afirmasi	ROO.26.01.25.05	4. Persyaratan dokumen KK 5. Validasi tanggal penerbitan KK 6. Pengumuman hasil secara terbuka	4. Ketergantungan penuh pada dokumen administrasi 5. Tidak ada verifikasi faktual domisili 6. Tidak ada	4. Validasi silang dengan data kependudukan 5. Pemeriksaan sampel lapangan untuk kasus tertentu 6. Penetapan batas waktu minimal perubahan KK	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
				sistem deteksi pola alamat mencurigakan	sebelum PPDB				
6	Risiko Kemitraan: Ketergantungan pada penyedia sistem dan jaringan	ROO.26.01.25.06	3. Kontrak kerja sama dengan penyedia layanan 4. Koordinasi teknis sebelum pelaksanaan PPDB	Ketergantungan pada satu provider saja.	Menyediakan alternatif jaringan cadangan.	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
7	Risiko Operasional: Pemasangan APE (Alat Permainan Edukatif) tidak sesuai prosedur.	ROO.26.01.25.07	Meminta bukti berita acara serah terima dan foto pemasangan dari pihak sekolah setelah APE terpasang.	3. Tidak ada pengecekan teknis setelah pemasangan 4. Tidak ada checklist keselamatan sebelum digunakan	4. Membuat checklist pemasangan aman 5. Pemeriksaan fisik sebelum serah terima final 6. Pelatihan singkat kepada sekolah	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
8	Risiko Fraud: Harga APE dinaikkan atau spesifikasi diturunkan	ROO.26.01.25.08	1. Proses pengadaan sesuai aturan 2. Dokumen kontrak dan spesifikasi teknis	3. Tidak ada survei harga pasar independen 4. Evaluasi kualitas barang kurang detail	4. Survei harga pembanding sebelum pengadaan 5. Pemeriksaan spesifikasi barang secara detail	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
9	Risiko Kemitraan: Penyedia mengirim APE yang tidak sesuai standar keselamatan	ROO.26.01.25.09	Dalam kontrak sudah dicantumkan spesifikasi teknis bahan, dan Dinas melakukan pemeriksaan fisik saat barang diterima.	Pemeriksaan fisik hanya melihat dari luar, tidak mampu mendeteksi kandungan kimia (misalnya cat beracun) atau kekuatan bahan secara mendalam.	Mensyaratkan sertifikat uji laboratorium dari pihak ketiga yang kredibel (misalnya SNI), dan menerapkan sanksi denda yang berat jika kualitas tidak sesuai.	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
10	Risiko Operasional: Dana beasiswa terlambat dicairkan	ROO.26.01.25.10	1. Penetapan jadwal batas akhir pengumpulan dokumen. 2. Membuat daftar periksa kelengkapan dokumen.	Verifikasi masih mengandalkan dokumen fisik yang rawan hilang atau lambat diproses.	4. Menetapkan standar waktu verifikasi 5. Membuat sistem monitoring status berkas 6. Sosialisasi kelengkapan dokumen sebelum pengajuan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
11	Risiko Fraud: Dokumen atau data ekonomi dipalsukan demi mendapatkan beasiswa	ROO.26.01.25.11	3. Persyaratan dokumen resmi 4. Verifikasi administrasi oleh petugas	1. Tidak ada verifikasi lapangan 2. Tidak ada pengecekan silang dengan	3. Validasi silang dengan data kependudukan atau bantuan sosial 4. Pemeriksaan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
				data sosial lainnya	sampel lapangan				
12	Risiko Kemitraan: Lembaga nonformal tidak menyampaikan laporan penggunaan dana secara lengkap	ROO.26.01.25.12	1. Lembaga wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana. 2. Evaluasi tahunan lembaga	3. Laporan yang diserahkan lembaga tidak detail (hanya berupa total angka). 4. Dinas tidak melakukan audit mendadak atau pengecekan bukti pembayaran di lembaga.	1. Mewajibkan lembaga mitra mengisi laporan bulanan dengan rincian penggunaan dana yang sangat detail, termasuk foto dan bukti pembayaran. 2. Menetapkan tim audit internal Dinas untuk melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pembukuan lembaga mitra.	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
13	Risiko Operasional: Guru PAUD kesulitan menerjemahkan kurikulum Mulok ke dalam bentuk permainan	ROO.26.01.25.13	Dinas sudah mengadakan satu kali sosialisasi atau workshop pengenalan kurikulum mulok.	Pelatihan yang diberikan terlalu singkat atau tidak fokus pada sesi praktik membuat rencana permainan harian	Mengadakan pelatihan lanjutan yang wajibkan guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)	Bidang PAUD/ Nonformal, dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
				yang langsung bisa diterapkan guru.	berbasis permainan sebelum pelatihan berakhir.				
14	Risiko Fraud: Penyedia bahan ajar memalsukan laporan uji coba atau penilaian guru	ROO.26.01.25.14	Dinas mewajibkan adanya dokumen laporan hasil uji coba dan tanda tangan dari beberapa guru yang menjadi responden.	Dinas tidak melakukan verifikasi langsung kepada guru-guru responden. Laporan hanya dicek secara dokumen, sehingga mudah dipalsukan.	Melakukan wawancara acak (random check) atau kunjungan mendadak ke sekolah yang namanya tercantum dalam laporan uji coba untuk memverifikasi kebenaran laporan.	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
15	Risiko Kemitraan: Mitra menyerahkan modul yang tidak sesuai budaya lokal Lamongan dan tidak memberi pelatihan memadai	ROO.26.01.25.15	3. Review draft modul 4. Rapat pembahasan dengan tim internal	1. Tidak ada uji kelayakan budaya secara mendalam 2. Tidak ada standar minimal jam pelatihan	4. Melibatkan budayawan/akad emisi lokal dalam review 5. Menetapkan standar minimal pelatihan praktik 6. Evaluasi modul sebelum disahkan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
16	Risiko Operasional: Pengajuan formasi ASN tidak sesuai analisis kebutuhan	ROO.26.01.25.16	Menggunakan data jumlah siswa dan guru di setiap sekolah sebagai	Data yang dipakai hanya melihat jumlah total guru, tidak	Wajib menggunakan sistem analisis kebutuhan yang mengukur	Bidang GTK	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
			dasar pengajuan formasi.	memperhatikan spesialisasi mata pelajaran guru (misalnya: butuh guru Matematika, tapi yang diajukan guru Seni).	perbandingan antara beban jam mengajar total dengan jumlah guru per mata pelajaran.				
17	Risiko Fraud: Terjadi praktik suap atau kecurangan dalam penempatan guru berstatus ASN	ROO.26.01.25.17	Membentuk tim penempatan dan menempatkan guru berdasarkan hasil seleksi dan pengumuman resmi.	Kurangnya pengawasan setelah pengumuman resmi. Prosedur penempatan akhir masih bisa dimanipulasi di tingkat pelaksana.	Membuat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat dan guru yang ditempatkan, dan menggunakan sistem acak (random) yang jelas untuk penempatan akhir.	Bidang GTK	Januari - Desember 2026		
18	Risiko Kemitraan: Lembaga mitra yang ditunjuk untuk melakukan analisis kebutuhan GTK (penelitian/konsultan) memberikan data yang tidak akurat kepada Dinas	ROO.26.01.25.18	Dinas meminta laporan hasil kerja dari lembaga mitra sesuai perjanjian kontrak.	Dinas tidak melakukan validasi atau cross-check data ke lapangan (sekolah) untuk memastikan kebenaran data yang diberikan mitra.	Dinas wajib membentuk tim kecil untuk melakukan uji petik (sampling) minimal 10% dari data yang disajikan mitra untuk membandingkan dengan kondisi riil di	Bidang GTK	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
					lapangan.				
19	Risiko Operasional: Dokumen perencanaan terlambat diselesaikan	ROO.26.01.25.19	4. Jadwal tahapan perencanaan 5. Rapat koordinasi internal 6. Monitoring melalui aplikasi perencanaan	Staf baru belum memahami cara penyusunan dokumen perencanaan	Mengadakan pelatihan teknis rutin tentang penyusunan dokumen perencanaan bagi semua staf terkait, serta membuat checklist penyusunan dokumen yang wajib ditandatangani.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
20	Risiko Fraud: Manipulasi data capaian kinerja dalam laporan agar terlihat bagus	ROO.26.01.25.20	4. Review laporan oleh atasan langsung 5. Evaluasi kinerja tahunan 6. Pemeriksaan oleh Inspektorat	Tidak ada pengecekan acak (random check) ke lapangan untuk membandingkan data laporan dengan bukti fisik atau data riil di sekolah/UPT.	Membentuk tim audit internal yang bertugas melakukan verifikasi lapangan secara mendadak terhadap sampel data capaian kinerja yang dilaporkan.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
21	Risiko Kemitraan : Ketidaksinkronan prioritas antara Dinas Pendidikan dengan Bappeda	ROO.26.01.25.21	Dinas Pendidikan mengirimkan usulan program dalam rapat teknis.	Belum ada notulen komitmen prioritas yang terdokumentasi	Mengadakan pertemuan teknis bulanan (formal dan terstruktur) antara staf perencana	Sekretariat	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
				jelas yang merumuskan detail program dan anggaran.	Dinas Pendidikan dan staf di Bappeda untuk menyamakan persepsi dan prioritas sebelum program final disahkan.				
22	Risiko Operasional: Terjadi kesalahan dalam penginputan data gaji atau tunjangan	ROO.26.01.25.22	Ada dua orang yang bertugas memeriksa data (proses checking dan verifying) sebelum pembayaran gaji dilakukan.	Proses pemeriksaan (cek) dilakukan oleh pemeriksa yang juga terburu-buru, atau mereka hanya melihat angka tanpa mencocokkan kembali dengan data dasar kepegawaian.	Wajib menggunakan sistem komputerisasi untuk perhitungan gaji, dan setiap input harus diverifikasi oleh atasan menggunakan checklist khusus sebelum diajukan ke bendahara.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
23	Risiko Fraud: Pegawai tetap menerima tunjangan anak meskipun tidak lagi memenuhi syarat (anak sudah lulus kuliah/menikah/berusia >21/25 tahun)	ROO.26.01.25.23	Pegawai wajib mengisi surat pernyataan setiap tahun untuk memastikan data keluarga masih valid.	Surat pernyataan hanya formalitas, tidak ada pengecekan silang (cross-check) ke sekolah/Universitas atau instansi	Wajib ada audit data tunjangan anak setiap 6 bulan. Bagian Kepegawaian harus meminta bukti terbaru (misalnya surat keterangan belum	Sekretariat	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
				lain untuk memverifikasi kebenaran laporan pegawai.	menikah atau status kuliah) dari setiap anak yang usianya mendekati batas tanggungan.				
24	Risiko Kemitraan: Sistem bank mengalami gangguan saat proses transfer gaji	ROO.26.01.25.24	3. Koordinasi rutin dengan pihak bank 4. Konfirmasi transfer setelah pencairan	Gangguan terjadi tiba-tiba dan tidak ada skema cadangan transfer	3. Penjadwalan transfer lebih awal sebelum tanggal gaji 4. Mekanisme pengaduan cepat jika terjadi gangguan	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
25	Risiko Operasional: Pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai jadwal atau standar teknis	ROO.26.01.25.25	Terdapat daftar aset dan jadwal servis rutin.	Jadwal hanya di atas kertas, tidak ada pengecekan fisik bahwa servis sudah dilakukan sesuai standar.	Mewajibkan setiap kendaraan punya kartu kontrol servis yang diisi dan ditandatangani bengkel, lalu dicek oleh atasan.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
26	Risiko Fraud: Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi atau disewakan	ROO.26.01.25.26	Terdapat peraturan bahwa kendaraan dinas hanya untuk urusan kantor.	Aturan tidak ditegakkan, tidak ada pemeriksaan mendadak (sidak) di luar jam kerja.	Mewajibkan buku catatan perjalanan (logbook) yang mencantumkan tujuan, jarak tempuh, dan harus ditandatangani atasan setiap selesai	Sekretariat	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
					tugas.				
27	Risiko Kemitraan: Bengkel mengganti suku cadang asli dengan yang tidak asli	ROO.26.01.25.27	3. Kontrak kerja sama dengan bengkel resmi yang terpercaya 4. Bukti pembayaran dan nota servis	Pemeriksaan saat perbaikan tidak detail; tidak ada saksi dari Dinas yang mengawasi proses penggantian suku cadang di bengkel.	Pegawai Dinas wajib ikut mengecek suku cadang yang akan dipasang, memastikan ada label keaslian, dan menyimpan sisa suku cadang yang diganti.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
28	Risiko Operasional: Spesifikasi barang tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.01.25.28	Adanya dokumen spesifikasi teknis dan pemeriksaan oleh atasan sebelum pengadaan.	Spesifikasi dibuat tanpa melibatkan pengguna barang yang sebenarnya, sehingga tidak sesuai kebutuhan lapangan.	Setiap spesifikasi wajib ditinjau dan disetujui oleh petugas yang akan menggunakan barang tersebut (pengguna akhir).	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
29	Risiko Fraud: Petugas penerima menerima barang bekas/rekondisi yang diakui sebagai barang baru	ROO.26.01.25.29	Ada tim penerima barang yang bertugas memeriksa barang saat datang.	Pemeriksaan hanya melihat kemasan luar tanpa menguji fungsi barang secara mendalam, sehingga barang bekas yang dikemas ulang tetap lolos.	Wajib ada uji coba fungsi dan pengecekan fisik mendalam (misal: cek nomor seri) untuk memastikan barang benar-benar baru sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
30	Risiko Kemitraan: Penyedia tidak mengirim barang lengkap atau mengirim barang palsu/bekas	ROO.26.01.25.30	Ada kontrak yang menyebutkan jenis, jumlah, dan merek barang yang harus dikirim.	Sanksi di kontrak lemah, dan penyedia tahu bahwa Dinas jarang melakukan pengecekan mendalam terhadap keaslian atau status barang (baru/bekas).	Memasukkan klausul (pasal) di kontrak yang menyatakan bahwa penyedia akan langsung diblacklist dan wajib mengganti rugi penuh jika terbukti mengirim barang palsu atau bekas.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
31	Risiko Operasional: WiFi kantor lambat saat jam kerja sehingga menghambat input data dan layanan administrasi	ROO.26.01.25.31	3. Pemasangan password Wi-Fi 4. Pembatasan jumlah perangkat yang tersambung.	Belum ada sistem yang membatasi penggunaan data untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan (seperti blokir situs tertentu).	Memasang firewall atau aplikasi untuk memprioritaskan traffic pekerjaan dan membatasi akses ke situs yang tidak penting.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
32	Risiko Fraud: Pegawai menggunakan WiFi kantor untuk kepentingan pribadi (streaming, unduhan besar, bisnis pribadi)	ROO.26.01.25.32	Himbauan lisan dari atasan untuk menggunakan internet secara bijak.	Tidak ada sanksi tegas atau alat pelacak penggunaan internet setiap pegawai secara spesifik.	Membuat dan menyebarkan surat edaran resmi tentang larangan penggunaan internet kantor untuk hal pribadi, disertai sanksi jika	Sekretariat	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
					melanggar.				
33	Risiko Kemitraan: Penyedia internet lambat merespons gangguan atau kualitas layanan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.01.25.33	Dinas punya kontak hotline atau Customer Service penyedia jasa internet.	Tidak ada denda atau teguran tertulis yang otomatis diberikan jika penyedia jasa lambat memperbaiki kerusakan.	Melakukan evaluasi kontrak dan menambahkan klausul denda keterlambatan respons atau ancaman pemutusan kontrak jika layanan tidak sesuai standar.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
34	Risiko Operasional: Dana pemeliharaan habis di pertengahan tahun karena banyak kerusakan tak terduga	ROO.26.01.25.34	Anggaran tahunan sudah disiapkan berdasarkan usulan dari sekolah/unit kerja.	Tidak ada dana cadangan atau dana tak terduga yang dialokasikan khusus untuk perbaikan mendesak.	Melakukan survei kondisi gedung secara berkala (misal setiap 6 bulan) untuk memetakan potensi kerusakan besar, dan menyiapkan dana tak terduga dalam jumlah yang memadai.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		
35	Risiko Fraud: Anggaran pengecatan gedung dicairkan, tapi yang dicat hanya bagian depan saja	ROO.26.01.25.35	Kontrak tertulis yang menyebutkan seluruh bagian gedung harus dicat.	Tidak ada foto atau video hasil pekerjaan dari seluruh sisi gedung (depan, belakang,	Mewajibkan panitia penerima hasil pekerjaan untuk membuat Laporan Serah Terima Berbasis	Sekretariat	Januari - Desember 2026		

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan Realisasi
				samping) sebagai bukti serah terima.	Dokumentasi Foto & Video dari setiap sudut area yang dikerjakan.				
36	Risiko Kemitraan: Penyedia jasa bekerja asal-asalan sehingga hasil perbaikan cepat rusak	ROO.26.01.25.36	Kontrak mencantumkan spesifikasi material yang harus digunakan.	Pengawasan di lapangan (mandor atau pengawas Dinas) tidak rutin berada di lokasi proyek untuk memantau detail pekerjaan.	Memperkuat pengawasan lapangan dengan menugaskan satu pengawas Dinas secara penuh di lokasi proyek, serta menetapkan denda yang berat jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar mutu.	Sekretariat	Januari - Desember 2026		

Formulir Kertas Kerja
Pengkommunikasian Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2026
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkommunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Resiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:							
1	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Surat Undangan Nota Dinas Rapat Koordinasi	Dinas Pendidikan	Instansi dan Pemerintahan Desa Terkait	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
2	1. Memprioritaskan siswa dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Mengajukan penambahan anggaran untuk beasiswa	Surat Undangan Media Sosial Surat Pengajuan Penambahan Anggaran	Dinas Pendidikan (Sekretariat)	Instansi Terkait, Satuan Pendidikan, Peserta didik dan Mahasiswa	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Surat Undangan Rapat Sosialisasi Luring/Daring	Dinas Pendidikan (Bidang GTK)	Satuan Pendidikan dan Guru	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksnakan pelatihan dan BIMTEK	Surat Undangan Rapat Koordinasi Luring/Daring	Dinas Pendidikan (Sekretariat)	Pegawai Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	SAKIP kepada semua pegawai						waktu tertentu
Resiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:							
1	Menyelenggarakan workshop rutin khusus untuk operator baru dan sosialisasi perubahan aturan input data	Rapat Sosialisasi dan Bimtek Surat Undangan Juknis	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Operator Dapodik	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
2	4. Rekonsiliasi data Dapodik dengan kondisi riil di sekolah 5. Audit berbasis risiko (prioritas sekolah dengan data tidak wajar) 6. Penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing)	Nota Dinas Website Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan Operator Dapodik	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
3	3. Koordinasi berkala dengan pengelola sistem pusat 4. Pengendalian manual sementara jika sistem bermasalah	Nota Dinas Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Operator Dapodik	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
4	1. Melakukan uji beban sistem sebelum PPDB 2. Menambah kapasitas server saat masa puncak 3. Menyediakan server cadangan (backup system)	Nota Dinas Juknis	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
5	4. Validasi silang dengan data kependudukan 5. Pemeriksaan sampel lapangan untuk	Juknis Website Rapat	Bidang Pendidikan SMP dan	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	kasus tertentu 6. Penetapan batas waktu minimal perubahan KK sebelum PPDB	Sosialisasi dan Bimtek	Bidang GTK				waktu tertentu
6	Menyediakan alternatif jaringan cadangan.	Nota Dinas Juknis	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Operator Dapodik dan Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
7	4. Membuat checklist pemasangan aman 5. Pemeriksaan fisik sebelum serah terima final 6. Pelatihan singkat kepada sekolah	Juknis Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
8	3. Survei harga pembanding sebelum pengadaan 4. Pemeriksaan spesifikasi barang secara detail	Juknis Nota Dinas	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
9	Mensyaratkan sertifikat uji laboratorium dari pihak ketiga yang kredibel (misalnya SNI), dan menerapkan sanksi denda yang berat jika kualitas tidak sesuai.	Juknis Nota Dinas	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan dan pihak terkait	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
10	4. Menetapkan standar waktu verifikasi 5. Membuat sistem monitoring status berkas 6. Sosialisasi kelengkapan dokumen sebelum pengajuan	Juknis Website Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Guru, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
11	3. Validasi silang dengan data kependudukan atau bantuan sosial 4. Pemeriksaan sampel lapangan	Juknis Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan dan Peserta	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
				didik			waktu tertentu
12	3. Mewajibkan lembaga mitra mengisi laporan bulanan dengan rincian penggunaan dana yang sangat detail, termasuk foto dan bukti pembayaran. 4. Menetapkan tim audit internal Dinas untuk melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pembukuan lembaga mitra.	Nota Dinas Juknis	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
13	Mengadakan pelatihan lanjutan yang wajibkan guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) berbasis permainan sebelum pelatihan berakhir.	Rapat Sosialisasi dan Bimtek Surat Undangan	Bidang PAUD/ Nonformal, dan Bidang GTK	Guru	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
14	Melakukan wawancara acak (random check) atau kunjungan mendadak ke sekolah yang namanya tercantum dalam laporan uji coba untuk memverifikasi kebenaran laporan.	Nota Dinas	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
15	4. Melibatkan budayawan/akademisi lokal dalam review 5. Menetapkan standar minimal pelatihan praktik 6. Evaluasi modul sebelum disahkan	Rapat Sosialisasi dan Bimtek Juknis	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Satuan Pendidikan	Januari - Desember 2026		dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
16	Wajib menggunakan sistem analisis kebutuhan yang mengukur perbandingan antara beban jam mengajar total dengan jumlah guru per mata pelajaran.	Juknis Website	Bidang GTK	Guru dan Satuan pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
17	Membuat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat dan guru yang ditempatkan, dan menggunakan sistem acak (random) yang jelas untuk penempatan akhir.	Nota Dinas Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Bidang GTK	Guru dan Satuan pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
18	Dinas wajib membentuk tim kecil untuk melakukan uji petik (sampling) minimal 10% dari data yang disajikan mitra untuk membandingkan dengan kondisi riil di lapangan.	Nota Dinas	Bidang GTK	Pihak terkait			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
19	Mengadakan pelatihan teknis rutin tentang penyusunan dokumen perencanaan bagi semua staf terkait, serta membuat checklist penyusunan dokumen yang wajib ditandatangani.	Rapat Sosialisasi dan Bimtek Juknis	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
20	Membentuk tim audit internal yang bertugas melakukan verifikasi lapangan secara mendadak terhadap sampel data capaian kinerja yang dilaporkan.	Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
21	Mengadakan pertemuan teknis bulanan (formal dan terstruktur) antara staf perencana Dinas Pendidikan dan staf di Bappeda untuk menyamakan persepsi dan prioritas sebelum program final disahkan.	Rapat Sosialisasi dan Bimtek Juknis	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
22	Wajib menggunakan sistem komputerisasi untuk perhitungan gaji, dan setiap input harus diverifikasi oleh atasan menggunakan checklist khusus sebelum diajukan ke bendahara.	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
23	Wajib ada audit data tunjangan anak setiap 6 bulan. Bagian Kepegawaian harus meminta bukti terbaru (misalnya surat keterangan belum menikah atau status kuliah) dari setiap anak yang usianya mendekati batas tanggungan.	Nota Dinas Juknis	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
24	3. Penjadwalan transfer lebih awal sebelum tanggal gaji 4. Mekanisme pengaduan cepat jika terjadi gangguan	Nota Dinas Website Media Sosial	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
25	Mewajibkan setiap kendaraan punya kartu kontrol servis yang diisi dan ditandatangani bengkel, lalu dicek oleh atasan.	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
26	Mewajibkan buku catatan perjalanan (logbook) yang mencantumkan tujuan, jarak tempuh, dan harus ditandatangani atasan setiap selesai tugas.	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
27	Pegawai Dinas wajib ikut mengecek suku cadang yang akan dipasang, memastikan ada label keaslian, dan menyimpan sisa suku cadang yang diganti.	Juknis Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
28	Setiap spesifikasi wajib ditinjau dan disetujui oleh petugas yang akan menggunakan barang tersebut (pengguna akhir).	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
29	Wajib ada uji coba fungsi dan pengecekan fisik mendalam (misal: cek nomor seri) untuk memastikan barang	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	benar-benar baru sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.						waktu tertentu
30	Memasukkan klausul (pasal) di kontrak yang menyatakan bahwa penyedia akan langsung dblacklist dan wajib mengganti rugi penuh jika terbukti mengirim barang palsu atau bekas.	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
31	Memasang firewall atau aplikasi untuk memprioritaskan traffic pekerjaan dan membatasi akses ke situs yang tidak penting.	Nota Dinas Juknis	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
32	Membuat dan menyebarkan surat edaran resmi tentang larangan penggunaan internet kantor untuk hal pribadi, disertai sanksi jika melanggar.	Surat Undangan Nota Dinas Media Sosial	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
33	Melakukan evaluasi kontrak dan menambahkan klausul denda keterlambatan respons atau ancaman pemutusan kontrak jika layanan tidak sesuai standar.	Nota Dinas Juknis	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
34	Melakukan survei kondisi gedung secara berkala (misal setiap 6 bulan) untuk memetakan potensi kerusakan besar, dan menyiapkan dana tak terduga dalam jumlah yang memadai.	Nota Dinas Juknis	Sekretariat	Satuan Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
35	Mewajibkan panitia penerima hasil pekerjaan untuk membuat Laporan Serah Terima Berbasis Dokumentasi Foto & Video dari setiap sudut area yang dikerjakan.	Juknis Nota Dinas	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
36	Memperkuat pengawasan lapangan dengan menugaskan satu pengawas Dinas secara penuh di lokasi proyek, serta menetapkan denda yang berat jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar mutu.	Nota Dinas Juknis Rapat Sosialisasi dan Bimtek	Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2026
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Urusan Pemerintahan	Pendidikan

Dinas Terkait

Dinas Pendidikan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan							
1	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Kepala Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
2	1. Memprioritaskan siswa dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Mengajukan penambahan anggaran untuk beasiswa	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Kepala Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Kepala Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Kepala Dinas Pendidikan	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan							
1	Menyelenggarakan workshop rutin khusus untuk operator	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SD	Januari - Desember			dilaksanakan secara berkala

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	baru dan sosialisasi perubahan aturan input data		dan Bidang GTK	2026			atau pada waktu tertentu
2	4. Rekonsiliasi data Dapodik dengan kondisi riil di sekolah 5. Audit berbasis risiko (prioritas sekolah dengan data tidak wajar) 6. Penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing)	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
3	3. Koordinasi berkala dengan pengelola sistem pusat 4. Pengendalian manual sementara jika sistem bermasalah	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SD dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
4	1. Melakukan uji beban sistem sebelum PPDB 2. Menambah kapasitas server saat masa puncak 3. Menyediakan server cadangan (backup system)	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
5	4. Validasi silang dengan data kependudukan 5. Pemeriksaan sampel lapangan untuk kasus tertentu 6. Penetapan batas waktu minimal perubahan KK	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	sebelum PPDB						
6	Menyediakan alternatif jaringan cadangan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang Pendidikan SMP dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
7	4. Membuat checklist pemasangan aman 5. Pemeriksaan fisik sebelum serah terima final 6. Pelatihan singkat kepada sekolah	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
8	3. Survei harga pembanding sebelum pengadaan 4. Pemeriksaan spesifikasi barang secara detail	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
9	Mensyaratkan sertifikat uji laboratorium dari pihak ketiga yang kredibel (misalnya SNI), dan menerapkan sanksi denda yang berat jika kualitas tidak sesuai.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
10	4. Menetapkan standar waktu verifikasi 5. Membuat sistem monitoring status berkas 6. Sosialisasi kelengkapan dokumen sebelum pengajuan	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
11	3. Validasi silang dengan data	Monitoring dan	Bidang PAUD/	Januari -			dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	kependudukan atau bantuan sosial 4. Pemeriksaan sampel lapangan	evaluasi kegiatan	Nonformal dan Bidang GTK	Desember 2026			secara berkala atau pada waktu tertentu
12	3. Mewajibkan lembaga mitra mengisi laporan bulanan dengan rincian penggunaan dana yang sangat detail, termasuk foto dan bukti pembayaran. 4. Menetapkan tim audit internal Dinas untuk melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pembukuan lembaga mitra.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
13	Mengadakan pelatihan lanjutan yang wajibkan guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) berbasis permainan sebelum pelatihan berakhir.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal, dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
14	Melakukan wawancara acak (random check) atau kunjungan mendadak ke sekolah yang namanya tercantum dalam laporan uji coba untuk memverifikasi kebenaran laporan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
15	4. Melibatkan budayawan/akademisi lokal dalam review 5. Menetapkan standar minimal pelatihan praktik 6. Evaluasi modul sebelum disahkan	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang PAUD/ Nonformal dan Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
16	Wajib menggunakan sistem analisis kebutuhan yang mengukur perbandingan antara beban jam mengajar total dengan jumlah guru per mata pelajaran.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
17	Membuat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat dan guru yang ditempatkan, dan menggunakan sistem acak (random) yang jelas untuk penempatan akhir.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
18	Dinas wajib membentuk tim kecil untuk melakukan uji petik (sampling) minimal 10% dari data yang disajikan mitra untuk membandingkan dengan kondisi riil di lapangan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Bidang GTK	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
19	Mengadakan pelatihan teknis rutin tentang penyusunan	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember			dilaksanakan secara berkala

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	dokumen perencanaan bagi semua staf terkait, serta membuat checklist penyusunan dokumen yang wajib ditandatangani.			2026			atau pada waktu tertentu
20	Membentuk tim audit internal yang bertugas melakukan verifikasi lapangan secara mendadak terhadap sampel data capaian kinerja yang dilaporkan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
21	Mengadakan pertemuan teknis bulanan (formal dan terstruktur) antara staf perencana Dinas Pendidikan dan staf di Bappeda untuk menyamakan persepsi dan prioritas sebelum program final disahkan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
22	Wajib menggunakan sistem komputerisasi untuk perhitungan gaji, dan setiap input harus diverifikasi oleh atasan menggunakan checklist khusus sebelum diajukan ke bendahara.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
23	Wajib ada audit data tunjangan anak setiap 6 bulan. Bagian Kepegawaian	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	harus meminta bukti terbaru (misalnya surat keterangan belum menikah atau status kuliah) dari setiap anak yang usianya mendekati batas tanggungan.						tertentu
24	3. Penjadwalan transfer lebih awal sebelum tanggal gajian 4. Mekanisme pengaduan cepat jika terjadi gangguan	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
25	Mewajibkan setiap kendaraan punya kartu kontrol servis yang diisi dan ditandatangani bengkel, lalu dicek oleh atasan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
26	Mewajibkan buku catatan perjalanan (logbook) yang mencantumkan tujuan, jarak tempuh, dan harus ditandatangani atasan setiap selesai tugas.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
27	Pegawai Dinas wajib ikut mengecek suku cadang yang akan dipasang, memastikan ada label keaslian, dan menyimpan sisa suku cadang yang diganti.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
28	Setiap spesifikasi wajib	Monitoring dan	Sekretariat	Januari -			dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
	ditinjau dan disetujui oleh petugas yang akan menggunakan barang tersebut (pengguna akhir).	evaluasi kegiatan		Desember 2026			secara berkala atau pada waktu tertentu
29	Wajib ada uji coba fungsi dan pengecekan fisik mendalam (misal: cek nomor seri) untuk memastikan barang benar-benar baru sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
30	Memasukkan klausul (pasal) di kontrak yang menyatakan bahwa penyedia akan langsung diblacklist dan wajib mengganti rugi penuh jika terbukti mengirim barang palsu atau bekas.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
31	Memasang firewall atau aplikasi untuk memprioritaskan traffic pekerjaan dan membatasi akses ke situs yang tidak penting.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
32	Membuat dan menyebarkan surat edaran resmi tentang larangan penggunaan internet kantor untuk hal pribadi, disertai sanksi jika melanggar.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen Informasi	Keterangan
33	Melakukan evaluasi kontrak dan menambahkan klausul denda keterlambatan respons atau ancaman pemutusan kontrak jika layanan tidak sesuai standar.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
34	Melakukan survei kondisi gedung secara berkala (misal setiap 6 bulan) untuk memetakan potensi kerusakan besar, dan menyiapkan dana tak terduga dalam jumlah yang memadai.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
35	Mewajibkan panitia penerima hasil pekerjaan untuk membuat Laporan Serah Terima Berbasis Dokumentasi Foto & Video dari setiap sudut area yang dikerjakan.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu
36	Memperkuat pengawasan lapangan dengan menugaskan satu pengawas Dinas secara penuh di lokasi proyek, serta menetapkan denda yang berat jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar mutu.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Januari - Desember 2026			dilaksanakan secara berkala atau pada waktu tertentu